Drs. H. Moh. Adib, MA.

KEPENDUDUKAN

Kebijakan dan Penguatan Kelembagaan

Kata Pengantar: Sunarto, MPA, PhD

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA – INDONESIA

KEPENDUDUKAN

Kebijakan dan Penguatan Kelembagaan

DRS. H. Moh. Adib, MA.

Diterbitkan Atas Kerjasama:

Pusat Studi
Kependudukan dan Kebijakan
(PSKK)
Universitas Airlangga

TRIDHARMA PRESS

KEPENDUDUKAN:

Kebijakan dan Penguatan Kelembagaan

DRS. H. Moh. Adib, MA.

Copyright © Moh. Adib 2015
All right reserved ISBN:
ISBN 978-602-6851-03-1

Penyunting
Listiyono Santoso

Tata Letak dan Sampul
Gandring AS

Cetakan I, April 2016

Penerbit
TRIDHARMA PRESS
Jl. Gubeng Kertajaya VE No. 12 Surabaya 60281
Email: saga.penerbit@gmail.com
HP: 085655396657

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PRAKATA PENULIS

Berpengalaman lebih dari 15 tahun mengajar matakuliah Antropologi Kependudukan (SOA362) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, dan sejumlah kegiatan akademik lainnya, tepatlah prinsip hukum yang mengatakan bahwa "kalau tidak dapat mengerjakan seluruhnya, maka janganlah meninggalkan seluruhnya. Kerjakanlah sebagiannya, meskipun sedikit." Prinsip tersebut digunakan penulis untuk memulai tulisan melalui peristiwa-peristiwa penting, seperti kepesertaan atau kenarasumberan dalam pertemuan ilmiah misalnya seminar, simposium, kongres, musyawarah kerja, dan kegiatan live atau rekakaman pada sejumlah Radio FM atau televisi. Catatan-catatan kecil sebagai bahan ceramah itu disusun lagi dalam uraian yang sistematis setelah dilengkapi dengan sejumlah data yang relevan. Tepat juga menerapkan mutiara kata, "sedikit-demi sedikit lama-lama menjadi bukit." Bukit tidak harus tinggi, kalau tinggi namanya gunung. Nama kota "Bukit Tinggi" di Sumatra Barat, sesungguhnya merupakan gundukan tanah saja kemudian pada perkembangannya di bangun pasar di sekitarnya dan Jam Gadang di situ. Buku inipun, meskipun bukan seperti bukit, maka setarakan sajalah dengan gundukan tanah kecil seperti itu, dalam pegunungan kependudukan yang begitu amat besar dan luas.

Tulisan pada buku dihadapan pembaca ini adalah bagian kecil dari kumpulan catatan dari berbagai pertemuan yang terserak, yang sebagian besarnya telah dimuat di *Buletin Kependudukan* dan diterbitkan oleh Kantor Disnakertransduk

(Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan) Provinsi Jawa Timur. Sebagiannya juga telah dimuat di Surat Kabar Nasional yang terbit di Surabaya yaitu *Jawa Pos*. Pemuatannya, berlangsung pada kurun waktu sekitar dua tahun terakhir. Setelah melalui sejumlah perbaikan redaksional, bahan tersebut menjadi bagian utama dari buku ini.

Gagasan aktual dan penting yang dipaparkan sebagai landasan dalam isi buku ini adalah *No early marriage, No sex before marriage, and No drugs* (jangan menikah di usia dini, jangan koitus sebelum menikah, dan jangan meminum muinuman beralkohol, narkotika dan zat adiktif lainnya). Tiga kata itu yang saya nyatakan sebagai ucapan selamat di ulang tahunnya yang ketiga kepada PIK (Pusat Informasi dan Konsultasi) Remaja Ceria Sentul Jawa Barat. Pernyataan dalam video berdurasi 20 detik itu kemudian diunggah pada https://www.facebook.com/pikremaja.ceria sentul yang kemudian saya tampilkan di https://www.facebook.com/mohammad.adib.92. Penduduk usia remaja, saatnya anda berperilaku sadar untuk mengelola diri dan keluarga secara cerdas dan bermoral mulia serta masa depan masyarakat, bangsa, dan Negara Indoensia yang lebih baik. Uraian tersebut adalah merupakan bagian gagasan yang perinciannya dituangkan dalam buku yang telah di tangah para pembaca ini.

Buku yang terdiri dari sebelas bagian ini berfokus kepada kebijakan kependudukan yang penetapannya dilakukan secara nasional. Untuk menerapkannya, perlu pengawalan oleh aktor yang memiliki kepedulian yang tinggi kepada pengendalian

kuantitas dan penguatan kualitas penduduk yang berporos pada penentu kebijakan sampai dibasiskan kepada masyarakat di tingkat akar rumput sebagai subjek dan obyek perubahan dalam pembangunan kependudukan. Di level akar rumput inilah penduduk itu berkepresi dan bereksperimen tentang diri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negaranya. Suatu keniscayaan yang tidak boleh dilupakan adalah penguatan kelembagaan pada level nasional, regional, dan lokal untuk memberikan layanan kependudukan dan KB (Keluarga Berencana) kepada para penggunanya secara adil dan berkeadaban. Dalam kontes ini diperlukanlah penguatan kelembagaaan.

Kepada redaktur *Buletin Kependudukan* dan *Jawa Pos* selayaknyalah penulis sampaikan terima kasih, atas pemuatan sejumlah artikel yang penulis kirimkan. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) Perwakilan Provinsi Jawa Timur yang sering memfasilitasi penulis untuk hadir dalam berbagai kesempatan pertemuan ilmiah baik pada level lokal, regional, nasional, maupun internasional. Pada level internasional, BKKBN ini telah memfasilitasi penulis untuk hadir dan presentasi pada ICFP (*International Conference on Family Planning*) di BNDCC (Bali Nusa Dua Convetion Center). Terima kasih pula penulis sampaikan kepada Prof. Dr. Kuntoro, Dr.Ph. M.Ph., yang juga Ketua Koalisi Kependudukan (KK) Provinsi Jawa Timur periode 2011-2015 dan 2015-1019, atas supportnya kepada penulis untuk terus mengupdate teori dan metode di kependudukan. Juga Mas Lutfi Agus Salim, SKM., M.Si., --sekretaris KK Jatim—atas antusias yang tiada hentinya menggerakkan semangat untuk meningkatkan akurasi data

kependudukan, juga Mas Drs. Achmad Sjafi'i, M.Si., sekretaris PSKK Universitas Airlangga atas ketekunan dalam studi kependudukan, yang menginspirasi penulis. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada teman sejawat pengajar matakuliah Antropologi Kependudukan di FISIP Unair, Mas Drs. Nurcahyo Tri Arianto, M.Hum., dan YangTi Mbak DR. Pinky Saptandari, MA., juga kepada teman sejawat Prof. Dr. I. B. Wirawan, SU., dan Prof. Dr. Subagyo Adam, MS., Prof. dr. Marlina S. Mahajuddin, Sp.KJ, dosen dari Fakultas Kedokteran / RSUD DR. Soetomo, DR. Hj. Hamidah, M.Psi., Psikolog, dosen dari Fakultas Psikologi serta Dwi Rahayu Kristianti, SH., MH., dosen dari Fakultas Hukum UNAIR. Ning Nyigit Wudi Amini, M.Sc., staf di Pengendalian Penduduk BKKBN Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Ning Dra. Junita Elisabeth, M.Si., Redaktur Buletin Kependudukan di Kantor Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur. Para teman sejawat tersebut telah memberi kesempatan kepada penulis, untuk terus berdiskusi tentang kependudukan serta berbagai problem dan solusinya. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Direktur Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk BKKBN, Bapak Sunarto, MPA., Ph.D., yang di tengah-tengah kesibukannya yang begitu teramat padat, telah berkenan untuk memberikan Kata Pengantar pada buku ini.

Tulisan pada buku ini signifikan sebagai referensi dan pengayaan bagi para pemebelajar, baik pada tingkat perguruan tinggi maupun tingkat menengah, juga untuk para pemangku kepentingan yang melakukan aksi kegiatan di kantor pemerintahan dan non pemerintahan.

Akhir kata, tiada gading yang tidak retak. Juga tiada gedung yang tidak retak—pada era pembangunan—apalagi saat dilanda gempa, tulisan inipun terjadi keretakan, kekeliruan,

dan kekurangan di sana-sini. Untuk menguatkan rekatan dalam meminimalkan keretakan tersebut, sudah saatnyalah sumbang saran dari berbagai kalangan dibuka untuk perbaikan buku ini. Mohon maaf atas segala khilaf. Semoga semakin sukses, bemanfaat dan berkah. Aamiin.

Surabaya, 28 Nopember 2015

Penulis
H. Mohammad Adib, MA.

KATA PENGANTAR
Bonus Demografi dan Pendekatan Pemberdayaan

Oleh: Sunarto,MPA.,Ph.D.

Pada tahun 1970 an kebanyakan keluarga mempraktekkan norma keluarga besar dengan jumlah anak banyak. Praktek itu telah menyebabkan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita pada usia reproduksi 15 s.d 49 tahun (TFR) berada pada angka 5,6 perwanita. Tingginya angka itu menyebabkan struktur penduduk Indonesia banyak didominasi usia < 14 tahun. Melalui program KB nasional yang dilaksanakan secara intensif dengan dukungan tokoh agama dan masyarakat, Indonesia telah berhasil melaksanakan revolusi kependudukan dengan keberhasilannya memasyarakatkan norma keluarga kecil dengan menurunnya TFR dari 5,6 pada tahun 1970 menjadi 2,28 pada tahun 2015 (SUPAS 2015). Menurunnya angka kelahiran tersebut telah mengubah struktur penduduk Indonesia yang pada tahun 1970 banyak didominasi oleh penduduk usia yang tidak produktif, saat ini banyak didominasi oleh penduduk usia produktif pada usia 15 s.d. 64 tahun.

Berdasarkan proyeksi yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bappenas, rasio ketergantungan penduduk Indonesia pada tahun 2012 berada di angka 50%. Angka ini akan terus menurun dan akan mencapai puncaknya pada tahun 2035, dimana pada saat itu rasio ketergantungan penduduk

Indonesia akan berada pada angka 46,5%. Rendahnya angka ketergantungan ini yang menjadikan Indonesia mendapatkan bonus demografi (*demographic dividend*) karena memberi peluang Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Namun, peluang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan hanya akan terjadi apabila tenaga kerja yang melimpah itu memiliki kompetensi tinggi, memiliki karakter yang baik, tersedianya lapangan kerja, adanya peluang untuk memberdayakan penduduk bergender perempuan, serta lingkungan yang kondusif untuk berusaha. Apabila sejumlah persyaratan tersebut tidak terpenuhi, bukan tidak mungkin tujuan untuk mewujudkan Indonesia emas pada tahun 2045 hanya akan menjadi mimpi belaka. Bahkan bukan tidak mungkin akan terjadi gejolak sosial yang merajalela.

Dengan gambaran sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka semua pihak dituntut untuk secara bersama-sama berupaya memberikan perhatian, sumbang saran, pemikiran, agar Indonesia dapat memanfaatkan bonus demografi menjadi berkah. Selain daripada itu, diperlukan adanya kebijakan dan kelembagaan yang efektif dalam mengelola dan menyiapkan sumber daya manusia penduduk Indonesia sehingga tingginya jumlah penduduk usia produktif bisa menjadi potensi untuk peningkatan kesejahteraan dan peningkatan kualitas penduduk Indonesia.

Atas dasar gambaran tersebut, buku karangan saudara Drs. H. Muhammad Adib,MA., ini bisa menjadi referensi penting untuk mendalami dinamika penduduk secara filosofis, dan upaya yang perlu dilakukan oleh para pihak yang peduli

terhadap masalah kependudukan. Pendekatan pemberdayaan yang menggunakan siklus hidup mulai dari usia dini sampai dengan lansia dengan nilai-nilai ke-Indonesia-an amat diperlukan dalam mewujudkan penduduk Indonesia yang berkulitas di masa sekarang dan yang akan datang.

Jakarta, Nopember 2015.

Direktur Pemaduan Kebijakan
Pengendalian Penduduk BKKBN,
Sunarto, MPA.,Ph.D.

DAFTAR ISI

PRAKATA PENULIS		**v**
KATA PENGANTAR Oleh: Sunarto,MPA.,Ph.D.		**xi**
Bonus Demografi dan Pendekatan Pemberdayaan		
DAFTAR ISI		**xv**
DAFTAR TABEL, FOTO DAN DIAGRAM		**xviii**
ARTIKEL-1	**Tujuh "M" Daur Hidup: Merencanakan Generasi yang Lebih Sejahtera dan Mulia**	**1**
	Tujuh M	4
	Genre: Matipun Direncanakan Secara Mulia	7
ARTIKEL-2	**Tujuh Indakator Capaian Penduduk Sukses**	**13**
	Capaian Sukses	16
	Kesehatan: Nyaris Segalanya	18
	Bonek "Bobok Sama Nenek"	20
ARTIKEL-3	**Empat Skenario dalam Upaya Memutus Matarantai Penduduk Miskin**	**23**
	Kasus di Desa Sidonganti Tuban	26
	Akar Mata rantai Kemiskinan	28
ARTIKEL-4	**Jumlah (Persentase) Penduduk di Pulau Jawa Turun 11 Persen**	**35**
	Tujuh Kali Sensus	38
	Program Transmigrasi	40

ARTIKEL-5	**Menyosong Kecerahan Masa Depan Remaja dengan Karakter Cerdas dan Bermoral Mulia**	**43**
	Penguatan Kesadaran Berencana	47
	Cerdas dan Bermoral Mulia	49
ARTIKEL-6	**Memutus Matarantai Pernikahan Dini di Madura**	**51**
	Pernikahan Dini	55
	Empat Alasan	57
ARTIKEL-7	**Menetapkan Batas Usia Lansia Indonesia 65 Tahun (?)**	**61**
	Tingkatkan Kwalitas Layanan	65
ARTIKEL-8	**Lansia Tangguh yang Tak Pernah Mengeluh**	**69**
	Empat Post Power	72
	Tangguh dan Tidak Mengeluh	75
ARTIKEL-9	***Syahwat* Jawa Timur dalam Meningkatkan Kesejahteraan Lansia**	**77**
	Syahwat	81
	Semakin Peduli	82
ARTIKEL-10	**Teror Kependudukan oleh Para Remaja**	**85**
	Remaja	88
	Rekomendasi	92

ARTIKEL – 11 **Menguatkan Kelembagaan Pusat Studi Kependudukan** **95**
Otonomi Pusat Studi: Gunakan "Pancasila" 101
Penerapan di Pusat Studi lainnya? 104
ARTIKEL – 12 **Pemberdayaan Lansia Berbasis Komunitas Pedesaan di Jawa Timur** **107**
Wadah Pemberdayaan Lansia 111
Daya Ungkit Pemberdayaan 112
ARTIKEL – 13 ***Silver College:* Wadah Pemberdayaan Lansia di Perguruan Tinggi** **119**
Sepuluh Anasir 122
Silver College 126
DAFTAR PUSTAKA **128**
PROFIL PENULIS **133**

DAFTAR TABEL, FOTO DAN DIAGRAM

Tabel 1.	**Pengumuman Hasil Lomba Pidato Kependudukan Tahun 2014**	**11**
Tabel 2.	**Tamatan Sekolah pada Masyarakat di Desa Sidonganti Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban**	**32**
Tabel 3.	**Jumlah Penduduk Usia Remaja dan Pemuda (10-24 tahun)**	**48**
Tabel 4.	**Jumlah Penduduk yang Menikah di Usia Muda Di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan Tahun 2009**	**56**
Tabel 5.	**LPP (Laju Pertumbuhan Penduduk), Perbandingan Nasional dan Jawa Timur Tahun 1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010.**	**89**
Tabel 6.	**Perbandingan TFR Indonesia dan Jawa Timur (1994, 1997, 2002, 2007, 2012)**	**89**
Tabel 7.	**ASFR (Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19**	**90**
Tabel 8.	**Frekuensi dan Persentase Penduduk Jawa Timur Berdasarkan Kelompok**	**92**

	Remaja Umur 15-19 Tahun	
Tabel 9.	**Daftar Karang Werda Beprestasi Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur**	**114**
Foto 1.	***Backdrop* "Pola Tanam Sidonganti 3-1-8" di Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban**	**33**
Foto 2.	**Maket "Pola Tanam Sidonganti 3-1-8" di Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban**	**33**
Foto 3.	**Maket —Pola Tanam Sidonganti 3-1-8**	**34**
Foto 4.	**Peserta Workshop *Capacity Building* Kependudukan 2012**	**100**
Foto 5.	**Kegiatan *Capacity Building* Bidang Kependudukan dan Sosialisasi Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk (17-20 juni 2012)**	**106**
Diagram	**Diagram Kerjasama Transmigrasi Pemrov Jatim 2015-2019**	**42**

ARTIKEL-1

Tujuh "M" Daur Hidup: Merencanakan Generasi yang Lebih Sejahtera dan Mulia

ARTIKEL-1

Tujuh "M" Daur Hidup: Merencanakan Generasi yang Lebih Sejahtera dan Mulia

Lomba Pidato Kependudukan (LPK) tahun 2014 ini merupakan pelaksanaan yang kedua kalinya setelah dilaksanakan tahun 2013 yang baru lalu. Kegiatan yang digagas dan dilaksanakan oleh BKKBN Kantor Perwakilan Provisi Jawa Timur yang kemudian diadopsi oleh BKKBN Pusat ini dimaksuskan agar dapat meningkatkan kapasitas pengetahuan tentang KB (Keluarga Berencana dan Kependudukan) di kalangan para remaja dan dewasa muda. Mendasarkan pada kedua kategori itu pula LPK ini ditetapkan (Lihat Tabel 1.).

Tema umum yang diusung pada LPK tahun ini adalah "pengaruh pertambahan penduduk terhadap pembangunan bangsa di masa mendatang" bagi (i) kesejahteraan sosial ekonomi; (ii) kualitas hidup manusia, kehidupan sosial, budaya, dan agama; (iii) kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (iv) keseimbangan lingkungan dan kelestarian. Dari keempat tema tersebut, hampir merata diminati oleh para peserta.

Antusiasme para peserta sudah tampak tinggi sejak masa pendaftaran. Sampai pada masa akhir pendaftaran, telah hampir 90 orang peserta yang mendaftarkan dirinya dengan

menyerahkan tulisan dalam bentuk makalah singkat kepada panitia. Setelah dilakukan seleksi administrasi (*desk audit*), akhirnya panitia menetapkan 26 orang peserta dari kategori Dewasa Muda, dan 40 orang peserta dari kategori Remaja. Jumlah yang lulus seleksi adalah 66 orang peserta. Mereka berasal dari 19 Kabupaten dan Kota di Jawa Timur.

LPK tahun ini dilaksanakan di Kampus Unesa Surabaya pada hari Jumat 28 Juni 2014 dari jam 08.00-17.00. Tiga belas orang dewan juri telah dihadirkan dari Universitas Airlangga, Universitas Negeri Surabaya, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Akademi Perawat Madiun, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, dan dari Fapsedu (Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan). Hasil LPK 2014 telah diumumkan para pemenangnya dan dapat diakses di website Dalduk BKKBN Provinsi Jawa Timur di *http://daldukbkkbnjatim.com/berita_detail.php?p=berita_detail&id=49*.

Tujuh M

Terdapat hal yang menarik pada saat dilaksanakan Lomba Pidato oleh BKKBN Perwakilan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014. Hampir semuanya fasih menyampaikan pidato—tanpa teks—tentang jumlah jumlah penduduk Indonesia hasil Sensus Penduduk tahun 2000 dan perkembangannya pada empat tahun terakhir. Dengan tingkat pertumbuhan 1,49% maka diproyeksikan jumlah penduduk akan mencapai 450 juta pada tahun 2035. Di antara para peserta juga telah bicara teori Thomas Robert Malthus tentang deret ukur dan deret hitung

dalam memperbandingkan jumlah pertumbuhan penduduk dengan penyediaan bahan pangan. Permasalahan yang diangkat oleh peserta umumnya telah diberikan solusinya. Meskipun sejumlah diantaranya sudah kehabisan waktu—yang hanya enam menit—hanya untuk mengangkat permasalahan. Sehingga tidak sempat menyampaikan solusinya.

Seorang peserta bergender perempuan kategori remaja mengangkat tajuk 7 M untuk membahas tema Dampak Pertambahan Penduduk terhadap kualitas hidup manusia, kehidupan sosial, budaya, dan agama. Dengan suara lantang disertai penuturan yang lancar plus tekanan yang berapi-api sejak awal pidato, peserta itu mengajukan judul 7 M sebagai metode untuk meningkatkan kualitas penduduk Indonesia yang jumlahnya mencapai 240 juta jiwa. Jumlah tersebut telah menduduki rangking keempat tertinggi di dunia, setelah urutan ketiga negara Amerika Serikat, di atasnya lagi negara India, dan negara China dalam total jumlah penduduk dunia yang mencapai lebih dari tujuh milyard.

Tujuh M yang dimaksudkannya oleh peserta pidato ini adalah rangkaian kehidupan yang reguler dialami oleh penduduk normal di manapun mereka tinggal dunia ini. Rangkaian kehidupan itu biasa disebut sebagai daur hidup *(life cyrcle)* manusia yang dialaminya sejak lahir sampai dengan meninggal(kan) dunia ini. Ketujuh M itu diungkapkan dalam bahasa Indonesia yang baku dengan durasi waktu maksimal enam menit. Tujuh M merupakan huruf awal atau singkatan dari bahasa Jawa terdiri atas (i) *Metu* (lahir), (ii) *Makaryo*

(bekerja); (iii) *Manten* (Menikah), (iii) *Meteng* (mengandung), (iv) *Manak* (melahirkan), (v) *Mantu* (Kegiatan menikahkan anak), dan (vii) *Mati* (meninggal dunia).

Dalam daur hidup manusia, ketujuh M itu pasti dialami oleh umumnya penduduk yang normal. Karena dapat saja seseorang menemui ajalanya (M-7), sebelum melaksanakan kegiatan Mantu (M-6), atau M-6 (melahirkan bagi penduduk bergender perempuan dan mempunyai keturunan anak bagi penduduk bergender laki-laki), atau M-5 (Manikahkan anak), atau M-4 (hamil), M-4 (Menikah), M-3 (*metu* atau lahir).

Terdapat sejumlah data bahwa suatu janin telah meninggal dunia sebelum sempat dilahirkan. Maksudnya janin itu telah mengalami M-7 sebelum sempat dilahirkan dari rahim bundanya disebabkan oleh banyak hal misalnya tekanan darah (tensi) ibunya yang sangat tinggi, sehingga pasokan oksigen dan atau nutrisi dari ibunda kepada janin yang dikandungnya mengalami hambatan untuk dapat hidup. Akibatnya janin meninggal dunia di dalam kandungan ibunya. Melalui pendekatan medis, proses persalingan "paksa" ini harus dilakukan dengan teknik operasi sesar. Kegiatan operasi sesar dilakukan terutama untuk menyelamatkan nyawa bunda yang mengandung bayi itu.

Lantas peserta Pidato itu menuturkan pentingnya menyiapkan pengembangan kualitas penduduk, baik yang bergender lelaki terutama perempuan untuk membekali diri sejak dini dengan pengetahuan *(knowledge)* yang memadai

agar—pada saatnya—dapat mengandung janin yang sehat dan—pada tahap berikutnya—dapat melahirkan jabang bayi yang memiliki kwalifikasi yang tinggi untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan alam dan sosial yang makin tidak ramah. Penyadaran tentang pengetahuan tersebut juga dimaksudkan untuk mewujudkan generasi yang lebih berkualitas tinggi yang dalam BKKBN disebut sebagai Genre (Generasi Berencana).

Genre: Matipun Direncanakan Secara Mulia

Setelah sukses dalam M-1 para Genre hendaknya dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai agar bayi yang berhasil dilahirkannya kemudian dilakukan perawatan pada usia Batita (Bawah Tiga Tahun), dan Balita (Bawah umur Lima Tahun). Usia-usia ini adalah sangat rawan bagi anak manusia terhadap berbagai gangguan dan ancaman kesehatan. Genre yang berkwalitas tinggi adalah Generasi yang berpengetahuan cukup dan siap untuk melahirkan dan merawat bayi dengan sehat serta gizi-protein yang memadai agar dapat masuk ke jenjang pendidikan di tingkat PAUD, TK, SD, SMA, dan dan lulus sampai jenjang Perguruan Tinggi dalam keadaan sehat sejahtera baik jasmani maupun ruhaninya.

Memasuki M-2 adalah *Makaryo* (bekerja). Setelah menyiapkan diri dengan SDM (Sumber Daya Manusaia) yang proporsional dan mampu bersaing baik pada tingkat lokal, nasional, dan internasional. Tahun 2015 di kawasan Asean telah disepakati Pasar Bebas (MEA: Masyarakt Ekonomi Asean), maka penduduk Indonesia harus bekerja yang lapangan

pekerjaan tersedia dalam jumlah yang terbatas, kemudian diperebutkan juga oleh angkatan kerja dari negara-negara di kawasan Asean.

M-3 *Manten* (Nikah). Penduduk yang normal pada tahapnya akan melangsungkan pernikahan. Usia pernikahan sebaiknya dipertinggi sejalan dengan penyiapan SDM yang memadai. Genre mempersiapkan usia pernikahan di atas 22 tahun bagi perempuan dan di atas 25 tahun bagi lelaki. M-3 sebagai kelanjutan tidak terpisahkan dengan M-2, saat melaksanakan pernikahan adalah tepat apabila sudah memiliki pekerjaan yang tetap terutama bagi laki-laki. Di dalam rumah tangga, laki-laki adalah tulang punggung sedangkan perempuan adalah tulang rusuk dalam kegiatan ekonomi. Tugas utama laki-laki adalah penyedia nafkah keluarga. Sedangkan perempuan sebagai tulang rusuk yang berfungsi sebagai supporting, pendukung dalam tegaknya ekonomi rumah tangga.

M-4 dan 5 adalah *Meteng* dan *Manak* (mengandung, hamil dan kemudian melahirkan). Dalam konteks peningkatan kualitas hidup manusia, sudah sepatutnya—melalui penyiapan SDM pendidikan dan keterampilan yang memadai—para perempuan Indonesia—membuktikan jatidiri keperempuannya dengan sukses hamil dalam ikatan pernikahan/perkawinan yang sah menurut agama dan negara. Janin yang dikandungnya sehat dengan asupan gizi dan nutrisi yang memadai. Tiap mengkonsumsi makanan telah dilengkapi unsur empat sehat (nasi, sayur, lauk-pauk, buah), lima sempurna

(susu), enam paripurna (madu), tujuh supra sempurna (berdoa, bersyukur, beribadah). Semoga pula lancar dan gangsar saat melahirkan dengan proses persalinan yang normal.

M-6 adalah *Mantu* (menikahkan anak). Di antara ukuran hidup sukses dalam siklus hidup manusia adalah pernah mengalami pernikahan anak (kandung)nya dalam kondisi sehat wal afiat. Dalam kegiatan, menikahkan anak, sangat terasa makin berbahagia saat telah mengantarkan anak sukses melepaskannya sampai lulus pendidikan minimal S-1 di perguruan tinggi. Lebih berbahagia lagi apabila para anak dan menantunya sudah memiliki pekerjaan tetap. Lebih sempurna pula apabila anak dan anak menantunya sudah memiliki rumah tempat tinggal atas namanya sendiri.

M-7 adalah *Mati* (meninggal dunia). Bagian yang terakhir ini pasti dialami oleh setiap manusia dan makhluk hidup lainnya. Karena merupakan kepastian yang datangnya tidak harus pakai undangan dan perginya tidak harus permisi, maka setiap penduduk harus menyiapkan diri dengan kwalifikasi yang optimal. Sehingga saat meninggal "ia dapat tersenyum saat orang disekitarnya sama menangis" yang disebabkan oleh berkah kebaikan yang telah dilakukan selama hidupnya. Amal kebajikan inilah yang setia menemani hidup di alam keabadian bersama Tuhan Allah SWT.

Meskipun M-4 dan 5 tersebutkan pada uraian di atas adalah untuk penduduk bergender perempuan, sesungguhnya yang dimaksudkan dalam rumus ini adalah juga bagi

penduduk yang bergender laki-laki. Agar melengkapi dirinya dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk siaga saat sebagai suami dari isterinya dan bapak bagi janin dan anak yang dilahirkannya, untuk terus setia sebagai pendamping isteri dan pelindung bagi keluarga sejahtera, bahagia, dan mulia yang sedang dibangunnya dalam paket Genre: Generasi Berencana.[]

Tabel 1. Pengumuman Hasil Lomba Pidato Kependudukan Tahun 2014

A. Kategori Remaja

NO. Peserta	NAMA	ASAL	PENDIDIKAN	Total Nilai	Juara
24	Gendis Vidya Hatmanti Sarjono	Kab. Bojonegoro	SMAN 1 Bojonegoro	870	I
2	Halimatus Sa'diyah	Kab.Magetan	SMAN 1 Magetan	864	II
14	Fiki Rachman Asy' ari	Kota Mojokerto	SMAN II Mojokerto	846	III

B. Kategori Dewasa Muda

NO. Peserta	NAMA	ASAL	PENDIDIKAN	Total Nilai	Juara
7	Raihna Meiska Pasaribu	Kota Madiun	Mhs Univ.Katolik Widyamandala	884	I
9	Wahida Barkatul Aini	Kab. Bangkalan	Mhs STKIP PGRI	880	II
5	Ikhwan Fitriyanto	Kab.Pasuruan		869	III

Sumber:
http://daldukbkkbnjatim.com/berita_detail.php?p=berita_detail&id=49

ARTIKEL-2

Tujuh Indakator Capaian Penduduk Sukses

ARTIKEL-2

Tujuh Indakator Capaian Penduduk Sukses

Meskipun kesehatan bukan segala-galanya, ia nyarislah segalanya. Karena, tanpa kesehatan, segalanya—nyaris—tidak berarti *(healty is not everything—it almost everything—but witouth healty, everything—almost—nothing)"* (Mohammad Adib).

Meskipun Tuhan berfirman, "jika kamu menghitung nikmat yang telah diberikan Tuhan kepadamu, maka engkau tidak akan mampu menghitungnya (QS. Ibrahim, 14:34)" tidak berarti kita tidak boleh mengekplisitkan berbagai nikmat tuhan itu. Tulisan ini juga bermaksud untuk membuktikan firman Tuhan yang lain bahwa "barang siapa menyukuri nikmat Tuhan, maka Ia akan menambahkannya, dan barang siapa yang mengingkari, maka siksa Tuhan sungguh amat pedih" (QS. Ibrahim, 14:5). Melalui firman tersebut sejatinya, tersusun hipoteris bahwa "dengan terus menyebut nikmat dan karunia yang telah Tuhan limpahkan kepada kita, maka kita semakin meyakini bahwa karunia itu semakin dilimpahkan kepada kita."

Minimal terdapat tujuh indikator capaian penduduk sukses, yang umumnya secara reguler kita telah dan akan melampauinya, dan disebutkan dalam tulisan ini. Ketujuh indikator capaian sukses (karunia) tersebut terangkum dalam daur hidup *(life cyrcle)* penduduk manusia dari lahir sampai meninggal dunia. Ketujuhnya adalah (i) lahir, (ii) hidup; (iii)

sehat; (iv) bayi, batita, dan Balita; (v) anak dan remaja; (vi) dewasa; (vii) Lansia.

Capaian Sukses

Pertama, lahir. Penduduk di Jawa Timur setiap hari terjadi kelahiran 1.654 jiwa. Lahir merupakan karunia Tuhan YME. Begitu berharganya sehingga tidak dapat disetarakan dengan ukuran rupiah atau dolar AS berapapun jumlahnya. Tidak sedikit, calon penduduk, janin alam kadungan ini, yang gagal lahir atau dilahirkan. Masih dalam kandungan, dalam hitungan sampai memasuki pekan ke-38 atau sembilan bulan, suatu janin tidak sukses untuk lahir di dunia, justru sebagian kasus harus dikeluarkan paksa dari rahim (kandungan) bundanya oleh dokter dengan alasan medis antara lain disebabkan oleh organ tubuh janin itu tidak memadai untuk sampai pada jenjang kelahiran. Misalnya kapasitas otak dalam tubuh janin itu tidak cukup untuk menjadi bayi yang siap dilahirkan, yang juga calon penududuk/manusia.

Ilmu pengetahuan dan teknologi pada abad 21 ini melalui USG (*ultrasonography*) dua, tiga, atau empat dimensi, telah mampu mendeteksi organ janin dalam kandungan, tidak hanya berat badan, namun juga panjang, kapasitas kepala dan otak, detak jantung, kecukupan jumlah air ketuban, jenis gender, dan sebagainya. Di wilayah Provinsi Jawa Timur, penambahan penduduk karena kelahiran tahun 2010 (sp 2010), adalah setiap tahun terjadi kelahiran 603.629 jiwa, yang berarti pada setiap bulan terjadi kelahiran 50.302 jiwa, dan setiap hari terjadi kelahiran 1.654 jiwa. Kelahiran yang ideal

adalah mengikuti skema persalinan normal, tidak melaui operasi *caesar*.

Kedua, hidup. Lahir dan kemudian hidup juga merupakan karunia dan pemberian Tuhan YME yang tidak dapat disetarakan dengan nilai uang berapapun jumlahnya. Bukti bahwa hidup itu merupakan pemberian (takdir) Tuhan adalah jenis kelamin, warna kulit, ras, suku bangsa. Kita tidak dapat memilihnya. Tuhan telah memberikan pilihan terbaik kepada kita. Bayi yang telah lahir kemudian hidup, tidak dapat memilih, ,isalnya dilahirkan dari rahim (orang tua) ras kulit pulih—umumnya warna kulit yang diidealkan oleh orang-orang dari yang ditakdirkan lahir dan hidup di kawasan Benua Asia. Tidak juga dapat memilih untuk dilahirkan dari orang tua yang pada perkembangannya menjadi presiden dalam suatu negara misalnya. Tidak sedikit kasus janin yang sukses lahir tetapi gagal hidup.

Di antara penyebab kegagalan hidup tersebut antara lain, saluran pernafasan bayi yang kemasukan air Ketuban, saat dalamse proses persalian yang terlanjur meracuni tubuh bayi dan tidak terselamatkan meskipun telah ditangani oleh dokter beserta peralatan canggihnya. Gagal hidup pasca persalinan juga dapat disebabkan oleh perawatan tali pusat yang tidak steril berakibat pada terkena tetanus. Lahir hidup pun tidak selalu lengkap organ tubuh dan panca indranya. Tidak sedikit bayi yang saat lahir tidak lengkap alat pendengarannya, sehingga dirinya tidak pernah dapat mendengar apapapun sejak lahir. Karenanya pula tidak dapat menirukan bunyi-

bunyian di sekitarnya termasuk menirukan suara orang berbicara.

Kesehatan: Nyaris Segalanya

Ketiga, sehat. Merupakan karunia Tuhan yang begitu sangat berharganya sehingga nyaris tidak dapat ternilai hargannya dengan apapun. Untuk mencapai kesehatan, sejumlah orang mengupayakan untuk membayarnya dengan apapun miliknya yang dapat dapat dijual dan atau digadaikan. Misalnya kendaraan (BPKB), emas permata, sertifikat (rumah dan tanah), dan sebagainya. Tidak jarang seseorang yang mengupayakan kesehatan diri dan anggota keluarganya sampai berhutang kepada orang dan atau lembaga lain. Tidak satu orangpun melakukan penawaran harga atas resep untuk membeli obat, dan atau harga operasi yang telah ditetapkan oleh dokter atau Rumah Sakit.

Dalam konteks ini, peluang emas-pemata itu, dimanfaatkan secara optimal oleh pengusaha dengan memberikan layanan asuransi kesehatan yang tahun 2014 ini oleh Pemerintah Indonesia dikelolakan tunggal oleh BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). Dapatlah saya katakan, sebagaimana sering saya sebutkan di berbagai kesempatan bahwa "meskipun kesehatan bukan segala-galanya, ia nyarislah segalanya. Karena, tanpa kesehatan, segalanya—nyaris—tidak berarti *(healty is not everything—it almost everything—but witouth healty, everything—almost—nothing)."*

Keempat, bayi, Batita, dan Balita. Konsisten dalam kesehatan maka anak yang lahir, hidup, dan sehat memperoleh prediket sebagai bayi. Saat berusia sampai tiga tahun berpredikat sebagai Batita (Bayi di bawah tiga tahun). Saat sampai pada usia lima tahun disebut Balita (Bayi di bawah lima tahun). Bayi, batita, dan balita adalah usia yang rentan kepada gangguan kesehatan. Daya tahan tubuh harus terus dipertinggi. Oleh sebab itu berbagai imunisasi telah dimasukkan ke dalam tubuh sang bayi agar sang bayi dapat terus berkadar kesejahteraan yang lebih tinggi dan sukses menuju jenjang usia berikutnya yang disebut anak-anak dan remaja.

Kelima, anak-anak dan remaja. Usia anak-anak adalah usia anak-anak mulai masuk sekolah (Taman Kanak-Kanak) hingga Sekolah Dasar (SD) sampai sekitar kelas lima atau kelas enam. Pada usia anak kelas lima dan atau enam anak-anak telah memasuki usia remaja—yang saat itu para anak yang bergender perempuan sebagiannya telah mulai mengalami datang bulan (*haid* atau *menstruasi*), sedangkan yang bergender lelaki telah mengalami mimpi basah. Usia remaja dipilahkan dalam remaja awal, menengah, dan akhir. Yang berarti usia sekolah kelas lima dan enam SD sampai Sekolah Menengah Pertama (SMP) kelas dua merupakan remaja awal. Sedangkan usia SMP kelas sembilan sampai usia Sekolah Menengah Atas (SMA) kelas 11 (sebelas) merupakan usia remaja akhir. Berakhirnya usia remaja akhir ini juga berhimpitan waktunya dengan usia dewasa.

Keenam, dewasa. Usia dewasa dapat dipilahkan dalam dewasa awal yakni saat mereka berusia kelas 11 sampai usia mahasiswa semester dua (tahun pertama) sekitar usia 18 tahun. Pada dewasa tengah para penduduk itu berusia kuliah di perguruan tinggi sampai tahun ke empat, setelah itu memasuki dewasa akhir yakni berusia tahun keempat dan atau sarjana sampai usia empat puluhan.

Ketujuh, Lansia. Usia lansia dipilahkan dalam kategori Lansia awal, menengah, dan akhir. Lansia awal telah dimulai usia penduduk kepala empat sampai 59 tahun *(early erderly people)*, dengan indikator telah berkurangnya daya ingat dengan sering lupa terhadap sesuatu. Sehingga tepatlah jika disebut sebagai anggota PDI (Penurunan Daya Ingat). Hampir setiap hari, selalu disibukkan dengan dirinya sendiri untuk mencari misalnya kunci kontak kendaraan bermotor, helmed, hand phone, charger HP dan lain-lain. Besoknya juga masih mengulangi hal yang serupa. Lansia (menengah) berusia 60 – 75 tahun *(elderly people)*. Sedangkan Lansia akhir *(very old people)* adalah penduduk yang berusia lebih dari 75 tahun.

Bonek: *Bobok* sama Nenek

Indikator reguler penduduk dengan predikat sukses—semestinya bahagia adalah *pertama*, saat mereka dapat mencapai minimal usia 60 tahun (UU 13 tahun 1997), telah melampaui ketujuh capaian sebagaimana diuraikan di atas. *Kedua,* kondisi fisik/badan dari penduduk tersebut, masih sehat dan afiat (berguna), dapat dijadikan contoh teladan sebagai penduduk sukses bagi anggota keluarga dan

masyarakat. *Ketiga,* karena sesuatu dan lain hal tidak dapat mencapai usia 60 tahun, tetapi pernah menyaksikan dan atau menikahkan anak kandungnya (Jawa: *Mantu*). *Keempat,* karena sesuatu dan lain hal, tidak hanya pernah melaksanakan kegiatan *mantu,* namun juga pernah mengalami menimang cucu. Melalui indikator sebagaimana diuraikan di atas, sungguhlah beruntung, sampai pada saat tulisan ini dibuat, penulis—meskipun enam tahun lagi insyaAllah mencapai usia 60 tahun, namun telah dikaruniai tiga orang anak bergender perempuan. Dua orang yang pertama telah dinikahkan. Anak yang nomor dua kami nikahkan pada Rabu 14-05-14. Sedangkan pada 18-05-14, saat tulisan ini dibuat, penulis juga telah dikaruniai seorang cucu bergender Lelaki dari anak perempuan yang nomor pertama.

Dengan demikian, saat tulisan ini dibuat, penulis telah menyandang empat predikat kesuksesan baru: pertama sebagai seorang YangKung (*Eyang Kakung*) dari seorang cucu lelaki; kedua, berhasil menjadi MC (*Momong Cucu*); ketiga, makin Bermutu (ber artinya mempunyai *putu*=cucu*);* dan keempat, makin sukses jadi Bonek (Boboknya sama Nenek—nenek). Melalui uraian ini, penulis selayaknya dan sepantasnya menyampaikan puji syukur ke hadirat Tuhan YME Allah Swt yang telah melimpahkan berbagai karunia sehat walafiat. Salam SMS (Semoga Makin Sehat, Semoga Makin Sejahtera, dan Semoga Makin Sukses,). []

ARTIKEL-3

Empat Skenario dalam Upaya Memutus Matarantai Penduduk Miskin

ARTIKEL-3

Empat Skenario dalam Upaya Memutus Matarantai Penduduk Miskin

Penduduk Indonesia yang berjumlah 235.173.553 jiwa (BPS SP 2010) mayoritasnya tinggal di Pulau Jawa (58%). Mereka tinggal di Pulau Jawa yang luasnya hanyalah berjumlah 6% dari total luas wilayah Indonesia. Dari enam provinsi yang terdapat di Pulau Jawa, maka Jawa Timur dengan jumah penduduk mencapai 36.717.483 jiwa adalah merupakan provinsi terbesar kedua setelah Jawa Barat, meskipun provinsi Jawa Barat telah dikurangi oleh Provinsi Banten. Persentase kemiskinan di Jawa Timur mencapai angka 13,85%. Dari jumlah dan persentase penduduk di Provinsi Jawa Timur tersebut, sejumlah 9,81 juta (24,29%) bertempat tinggal di sekitar hutan. Mereka berada di 2.092 desa (34,31%) pada 454 (68,68%) kecamatan. Total penduduk di sekitar hutan itu mayoritasnya adalah berada di areal hutan yang dikelola oleh Perhutani Unit II Jawa Timur. Di antara penduduk miskin yang tinggal di sekitar hutan adalah di desa Sidonganti Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban.

Desa Sidonganti ini merupakan desa termiskin di Kabupaten Tuban. Sebagaimana disebutkan oleh Bupati Kab. Tuban H. Fathul Huda bersama Kemenag Kab. Tuban saat mengikuti kegiatan safari Jum'at ke daerah dalam rangka membangun Tuban menuju Kota Religius dan makmur rakyatnya, yang nota benenya agama, ekonomi, pendidikan

dan kesehatan dalam perhatian Pemda Kab. Tuban. Bupati Tuban dalam sambutannya mengajak masyarakat Desa Sidonganti Kecamatan Kerek membangun masyarakat yang makmur dan sejahtera serta aparat yang sehat dan transparan. Karena desa ini adalah desa termiskin (Sumber: *http://jatim.kemenag.go.id/file/file/mimbar308/ditp1337276436.pdf* diakses, Jumat, 2 Nopember 2013, jam 16.56) (Lihat Foto 1 dan 2).

Kasus di Desa Sidonganti Tuban

Kemiskinan di Desa Sidonganti diperoleh gambaran dari hasil Sensus Penduduk Tahun 2010 yang jumlah penduduknya mencapai 4.567 orang dengan jumlah Rumah Tangga 1.372. Dilihat dari bidang pekerjaannya bagi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berjumlah 3.544 orang bekerja bidang pertanian sejumlah 3.368 orang (95,03%). Jumlah keluarga pertanian 1282 keluarga (96,97% dari jumlah Rumah Tangga), dari jumlah tersebut jumlah keluarga yang ada anggotanya menjadi buruh tani sejumlah 640 keluarga (49,92% dari jumlah keluarga pertanian) Sumber: *http://dibi.bnpb.go.id/DesInventar/ data_profil_wilayah.jsp*. diakses 25 Desember 2013 Jam 11:33 wib). Sementara luas lahan yang dimilikinnya rata-rata luasnya kurang dari 0,3 ha per Rumah tangga. Lahan kering tersebut hanyalah mengandalkan musim penghujan untuk mengolah tanaman pertanian seperti Jagung dan Kacang, serta sebagian jenis Padi Gogo. Karenanya ketertangungan penduduk Desa Sidonganti kepada lahan Perhutani sangat tinggi dan sering mendapat

predikat “lapar lahan”. Lahan-lahan tersebut pada musim kemarau hanyalah tanpak bebatuan berwarna putih, sejauh mata memandang.

Keterbatasan jumlah lahan pertanian bagi penduduk yang berkebudayaan dan berkegiatan ekonomi pertanian di Desa Sidonganti ini, menjadi semakin berat saat musik kemarau tiba. Di saat yang sama hadir pula musim orang menggelar hajatan dalam kegiatan “mantu” dan atau “sunatan”. Keharusan untuk menyelenggarakan hajatan keluarga tersebut diikuti oleh keharusan melakukan sumbang-menyumbang (*the gift*), maka menjadiman masa-masa tersebut menjadi saat yang kritis untuk mendapatkan uang kontan. Untuk memenuhi keharusan sosial dan budaya dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan sumbang-menyumbang, maka sebagai akibatnya di lingkungan masyarakat ini sangat rawan terjadi tindakan kriminal. Seperti penjambretan, pencurian, perampokan, pembegalan, penodongan, dan sebagainya. Sejumlah sopir dan atau tukang ojek di kota Tuban, akan menolak untuk mengantarkan Anda menuju Desa ini apabila lebih dari jam 14.00 di siang hari, apalagi pada waktu, sore, atau malam hari. Petugas kepolisian dari orang lokal di sekitar desa inipun juga harus meningkatkan ekstra kewaspadaan apabila melintas di wilayah ini, saat mereka berkendara sendirian. Dapat pula menjadi sasaran kriminal.

Perhatikan data yang terakhir, para aktornya masih terus melakukan tindakan kriminal. Tidak hanya sendirian,

tetapi juga "berjamaah." Jumlah mereka sampai lebih dari 600 orang pelaku, di waktu siang hari. Pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2013 ini, sejumlah 600-an lebih orang-orang dari desa Sidonganti ini dan desa di sekitarnya melakukan penjarahan Pohon Jati dalam pengelolaan Perhutani KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) Parengan di petak 8A RPH (Resot Pemankuan Hutan) Guwoterus, BKPH (Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan) Mulyoagung. Sejumlah 27 pohon telah berhasil dirobohkan dan di potong-potong kayunya yang siap untuk diusung para pelaku. Jaringan komunikasi yang disiapkan oleh petugas dan aparat telah memungkinkan untuk segera menghadirkan aparat kepolisian dari Brimob. Saat diberikan tembakan peringatan oleh aparat ini, dilakukan perlawanan oleh para pelakunya. Pada perkembangannya, tiga orang pelaku dari Desa Sidonganti yang juga diidentifikasi dan ditetapkan sebagai TO (Target Operasi) telah berhasil dilumpuhkan dengan tembakan di bagian dada, perut, dan kaki. Tiga pelaku itu adalah Parto Sukiran (45), Tono (30), dan Darkum (23) (Lihat *Radar Jatim,* dan *detikNews,* Berita Jawa Timur, 7-9 Oktober 2013).

Akar Mata Rantai Kemiskinan

Perilaku kriminal sebagaimana fenomena di atas masih marak terjadi di berbagai daerah di Jawa sampai akhir tahun 2013, seperti yang terjadi di Wonogiri, Bojonegoro, Sumenep, Bondowoso, Jatirogo Tuban, Blora, Purwokerto dan lain-lain. Bahkan terbukti orang dalam dari petugas Perhutani juga terlibat sebagai dalang dalam pencurian dan atau penjarahan

yang dilakukan oleh Sutrisno (40) serarang Mandor Tanam Perum Perhutani (sumber: Merdeka.com Rabu 17 Oktober 2013). Namun demikian di akhir tahun 2013 perilaku penjarahan dengan mengarahkan sampai 600 lebih orang adalah fenomena yang tidak biasa. Sesungguhnya perilaku kriminal sebagaimana dicontohkan pada kasus di atas adalah merupakan akibat saja dari serangkaian kemiskinan yang amat parah sebagaimana terjadi di lokasi Desa ini. Tindakan represif dari aparat sudah selayaknya dilakukan, yang kewenangan melakukan tersebut sebagai representasi dari negara adalah aparat kepolisian. Hal substansial yang lebih mendasar dan tidak boleh dilupakan adalah mengatasi akar—sebagai penyebab—kemiskinan yang dalam artikel ini kita sebut sebagai memutus mata rantai kemiskinan.

Empat skenario dalam upaya memutus matarantai kemiskinan (Hans, Antlov:2008)) sangat layak untuk memperoleh perhatian dari para pemangku kepentingan *(stake holders)* yang berpeluang untuk mengkolaborasi tugas adalah (i) penentu kebijakan (pemerintah), (ii) dunia usaha, dan (iii) masyarakat (antara lain LSM=Lembaga Swadaya Masyarakat). Kolaborasi antar tiga elemen pembangunan tersebut harus segera dikuatkan dan diwujdukan. Para penduduk miskin yang berjumlah ribuan orang di suatu desa, akan terurai dan terputus mata rantainya secara bertahap dengan cara sebagai berikut.

Pertama, menyediakan akses ke pasar atau lapangan pekerjaan. Selama mereka tidak memperoleh akses bagi

lapangan pekerjaan baik formal maupun informal yang layak dan atau memadai bersamaan dengan terus merangkaknya tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang dasar dan pola hidup "modern kota", maka kemiskinan akan terus melekat pada kehidupan mereka. Para penganggur seperti ini sangat rawan terlibat dalam perilaku kriminal.

Kedua, kerusakan lingkungan dan hilangnya habitat. Di Kawasan Desa Sidonganti dikenal sebagai daerah hutan yang lebat, sejak nenek moyang mungkin ratusan tahun yang lalu. Kisah legendaris tentang Guru Bagong dan Murid Lempar yang memberi nama Desa Sidonganti di hutan atau *alas nDelong,* sangat segar dalam ingatan. Penduduk dapat menangkap sejumlah burung di hutan yang di dalamnya juga terdapat sejumlah mata air yang jernih. Kerimbunan hutan beserta habitat birang di dalamnya sudah semakin rusak terhitung sejak awal kemerdekaan tahun 1950-an. Berbagai komponen masyarakat dan oknum telah memberikan pelajaran yang sistematis untuk penduduk dalam melakukan pencurian dan penjarahan kayu Jati di hutan. Kawasan Tuban pada umumnya hutan telah semakin "gundul" bersamaan itu pula habitat di dalamnya juga semakin sirna.

Ketiga, pelayanan sosial terutama pendidikan dan kesehatan tidak memadai. Di bidang pendidikan, penduduk Desa Sidonganti berumur 15 tahun ke atas hanyalah tamat SD berjumlah 42%, tidak atau belum tamat SD berjumlah 3%, dan tamat SMP sejumlah 3% (BPS SP 2010). Lembaga pendidikan telah terdapat dua SD negeri di desa ini yakni di Dukuh Suco

dan Dukuh Tegal Guwo. Namun pendidikan di tingkat SMP Swasta terdekat adalah delapan km sedangkan SMP Negeri 11 Km di Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban. Prasarana jalan meskipun sudah *berhotmix,* tiga tahun terakhir, ke lokasi sekolah tersebut tidak tersedia transportasi umum.

Keempat, tidak atau kurang berperansertanya penduduk miskin dalam proses penetapan sampai monitoring dan evaluasi kebijakan. Umumnya penduduk miskin hanyalah dijadikan objek dan sasaran program yang kegiatan-kegiatannya berupa proyek yang dikerjakan oleh elit masyarakat baik lokal maupun supra lokal. Sudah saatnya pengelolaan dari bawah (bottom up) dapat dilaksanakan secara nyata dalam penyelesaian kemiskinan sampai pada gerakan di akar rumput. Sejumlah program dan kegiatan yang disusun hanya dari luar diri para penduduk miskin itu, umumnya akan berhenti dan terbengkalai bersamaan dengan berakhirnya pelaksanaan program. Penduduk miskin akan kembali kepada kondisi semula yakni masih terjerembab dalam kemiskinan.

Empat skenario dalam upaya untuk memutus matarantai kemiskinan ini merupakan satu rangkaian pengelolaan yang tidak dapat dipisahkan dari salah satunya. Keempatnya merupakan rangkaian sistem yang saling terkait. Inti utamanya adalah menempatkan penduduk miskin sebagai aktor dalam memutus matarantai kemiskinan. Berbagai pihak dari para pemangku kepentingan sudah saatnya meneguhkan komitmen dan lebih bersungguh-sungguh berkolaborasi

dalam upaya untuk memutus matarantai kemiskinan melalui emat model skenario ini.

Tabel 2. Tamatan Sekolah pada Masyarakat di Desa Sidonganti Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban

No.	Tamatan Sekolah	Jumlah	Persentase
1.	Buta Huruf Usia 10 Tahun ke atas	2230 orang	50 %
2.	Pra-Sekolah	52 orang	1,20 %
3.	Tidak Tamat SD	893 orang	21 %
4.	Tamat Sekolah SD	1.026 orang	24 %
5.	Tamat Sekolah SMP	103 orang	2,38 %
6.	Tamat Sekolah SMA	26 orang	0,60 %
7.	Tamat Sekolah PT/ Akademi	6 orang	0,14 %
Jumlah Total		4.330 orang	100 %

Sumber: RPJM Desa Sidonganti 2010-2014 Tahun 2011

Foto 1. dan 2. *Backdrop* dan Maket "Pola Tanam Sidonganti 3-1-8" di Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban

Sumber: Data Lapangan (Foto: Mohammad Adib).
Keterangan: Petugas (Memegang Microphone) menjelaskan "Pola Tanam Sidonganti 3-1-8" di Depan Bupati (KH. Fathul Huda), Muspida Tuban, DPRD Tuban, Kepala Pengadilan Negeri Tuban, Kepala Kejaksaan Negeri Tuban. serta Pimpinan Perhutani Unit II Jawa Timur Rabu 18 April 2012.

Foto 3. Maket "Pola Tanam Sidonganti 3-1-8"

Sumber: Data Lapangan (Foto: Mohammad Adib)

ARTIKEL-4

Jumlah (Persentase) Penduduk di Pulau Jawa Turun 11 Persen

ARTIKEL-4

Jumlah (Persentase) Penduduk di Pulau Jawa Turun 11 Persen

Tahun 2015, merupakan batas penetapan pembangunan kependudukan dunia yang disebut sebagai MDGs (*Millenium Development Goals*) dengan capaia-capaian yang telah ditetapkan. Pada tahun ini, penduduk Indonesia mencapai jumlah 250 juta yang dalam bahasa *keren*nya juga berarti seperempat milyar. Jumlah tersebut mengingatkan kita pada jumlah penduduk dunia pada awal masehi 2015 tahun yang lalu. Sementara pada tahun ini pula jumlah penduduk dunia telah mencapai jumlah 7,4 milyar. Menyadari berbagai keterbatasan dalam pencapaian tersebut, diusunglah skema SDGs (*Sustainable Development Goals*).

Pertumbuhan penduduk meledak begitu cepatnya. Dari jumlah seperempat milyar pada awal masehi—saat kelahiran Nabi Isa as—itu untuk menjadi satu milyar yakni bertambah ¾ milayar terjadi pada tahun 1800. Berarti pula untuk penambahan ¾ milyar penduduk, butuh waktu 1800 tahun. Pada tahun 1930, berjumlah dua milyar. Berarti untuk bertambah satu milyar membutuhkan waktu 1,3 abad (130 tahun).

Pertumbuhan penduduk saat itu terasa semakin cepat, pada tahun 1960 telah berjumlah tiga milyar. Pada penambahan satu milyar di era ini dibutuhkan waktu lebih

pendek yakni 30 tahun (dari tahun 1930-1960). Pada jumlah penduduk empat milyar terjadi pada tahun 1975. Percepatan itu semakin terasa yakni membutuhkan waktu yang lebih pendek yaitu separuh waktu saja (15 tahun) dari penambahan jumlah yang sama. Jumlah penduduk dunia lima milyar terjadi pada tahun 1983, membutuhkan waktu yang lebih pendek yakni 13 tahun.

Dalam jangka waktu 12 tahun kemudian (tahun 2000) awal abad millenium kedua, penduduk dunia telah berjumlah enam milyar. Pertambahan lagi menjadi tujuh milyar terjadi pada tahun 2011. Itu berarti hanya butuh waktu 11 tahun untuk tambah satu milyar. Empat tahun kemudian yakni tahun 2015 sekarang ini penduduk dunia telah berjumlah 7,4 milyar.

Tujuh Kali Sensus

Jutuh Jumlah penduduk di Indonesia berdasarkan data tujuh kali sensus (1930, 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010), konsentrasi persebarannya masih tetap di Pulau Jawa (dan Madura), walaupun persentasenya menurun sampai 11 persen dalam waktu 80 tahun. Pada SP (Sensus Penduduk) tahun 1930 masa pemerintahan penjajahan Belanda, penduduk di Jawa jumlah 69%, di Sumatra berjumlah 14%, Sulawesi 7%, sejumlah 7% pula di pulau-pulau lainnya sedangkan di Kalimantan berjumlah 4%.

Pada SP tahun 1961, persentase penduduk di Pulau Jawa menurun empat persen menjadi 65%, sementara kenaikan persentase terjadi di Sumatra (17%). Pada SP 1971 di

Pulau Jawa terjadi penurunan satu persen menjadi 64% sedangkan di Sumatra terjadi kenaikan menjadi 18%. Pada SP tahun 1980, di Jawa terjadi penurunan persentase lagi menjadi 62%, kenaikan persentase terjadi di Sumatra (19%) juga di Kalimantan (5%), dan pulau-pulau lainnya (8%). Pada SP 1990, persentase penduduk di Pulau Jawa menurun lagi menjadi 60%. Kenaikan persenase terjadi di Sumatra (20%). Pada SP tahun 2000 persentasenya sama dengan SP 1990. Pada SP 2010, persentase penduduk di Pulau Jawa menurun lagi menjadi 58%, dengan kenaikan persentase di Sumatra (21%), Kalimantan (6%), dan pulau-pulau lainnya (8%) (Yahya:2014).

Persebaran penduduk Indonesia menurut pulau (SP 2010) tetap tidak merata, yang terkonsentrasi di kota-kota besar. Di Pulau Jawa 57,49%, Sumatra (21,31%), Sulawesi (7,31%), Kalimantan (5,8%), Bali dan Nusa Tenggara (5,5%), Maluku dan Papua (2,6%). Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir telah terjadi perubahan pola migrasi dari pulau Jawa ke luar Jawa dan terjadi migrasi dari *central urban* ke *sub-uurban* sehingga area perkotaan semakin melebar. Cukup menarik terjadinya pergeseran pola migrasi dari Jawa ke luar Jawa ini sektor yang dimasuki adalah bidang konstruksi dan Jasa (Yahya:2014).

Melebarnya area perkotaan (*urban*) juga terjadi pemekaran wilayah provinsi, kebupaten dan kota di tanah air, sebagai implikasi dari kebijakan Otonomi Daerah dapa pasca Reformasi. Pada pemekaran ini sejumlah wilayah desa telah diubah status administrasinya menjadi kota melalui peraturan

perundang-undangan. Meskipun dapat terjadi bahwa penduduknya juga orang itu-itu pula, tetapi ketentuan perundang-undangan yang baru menetapkan bahwa wilayahnya telah berstatus sebagai kota (*urban*).

Program Transmigrasi

Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) telah berupaya untuk mengelola mobilitas penduduk melalui program transmigrasi. Kebijakan bertransmigrasi dalam menangani mobilitas penduduk yang berjumlah 38.61 juta jiwa (2014), Laju Pertumbuhan Penduduk 0,64%, dan kepadatan penduduk mencapai 805 jiwa per Km2. Strategi yang ditempuhnya adalah meningkatkan penempatan penduduk potensial di daerah transmigrasi. Isi kebijakannya adalah meningkatkan dan mengembangkan kerjasama program transmigrasi dengan provinsi/kabupaten di luar Jawa. Adapun dua program ketransmigrasian yang ditempuh adalah (i) memfasilitasi perpindahan dan penempatan penduduk ke Luar Jawa; dan (ii) mengoptimalkan penempatan calon transmigran.

Kerjasama transmigrasi yang telah dilakukan oleh ditapkan Pemprov Jatim, kepada kepada sembilan provinsi di luar Jawa terdiri atas 13 kabupaten/kota. Kerjasama ini pada tahun 2014 telah merealisasikan 327 KK (Kepala Keluarga atau 963 jiwa). Pada lima tahun ke depan (2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019) tiap tahunnya merencanakan untuk mengirim transmigran ke luar Jawa dengan jumlah 115 – 168 KK (Kepala Keluarga).

Adapun sembilan provinsi penerima transmigran di luar Jawa yang telah bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah (i) Provinsi Sumatra Selatan, (ii) Kalimantan Utara (Kabupaten Bulungan), (iii) Sulawesi Tenggara; (iv) Gorontalo; (v) Bengkulu; (vi) Maluku; (vii) Kalimantan Barat; (viii) Sulawesi Selatan; dan (ix) Bangka Belitung (Lihat Diagram).

Meskipun disadari sepenuhnya bahwa jumlah 1000-an jiwa setiap tahun—dan 5000-an jiwa pada waktu lima tahun—yang dilakukan pengiriman transmigran ke luar Pulau Jawa, pada saat yang sama juga terjadi migrasi yang masuk ke Pulau Jawa yang dengan migrasi masuk tersebut mungkin saja lebih dari jumlah seribuan jiwa tersebut.

Pemprov Jatim juga merupakan bagian dari lima provinsi di Pulau Jawa. Persebaran jumlah penduduk ke wilayah luar Jawa, persentasenya akan semakin meningkat manakala keempat provinsi lainnya juga melaksanakan intensifikasi dalam kegiatan transmigrasi dan migrasi lainnya ke luar Jawa. Keempat provinsi lainnya tersebut adalah Pemprov Jawa Tengah, DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta), DKI (Daerah Khusus Ibukota) Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Sehingga menurunnya persentase jumlah penduduk di Pulau Jawa selama 80 tahun dalam tujuh kali kegiatan sensus penduduk, hanyalah mampu menurunkan 11 persen saja dan sungguh terasa sangat lamban.[]

Diagram Kerjasama Transmigrasi Pemrov Jatim 2015-2019

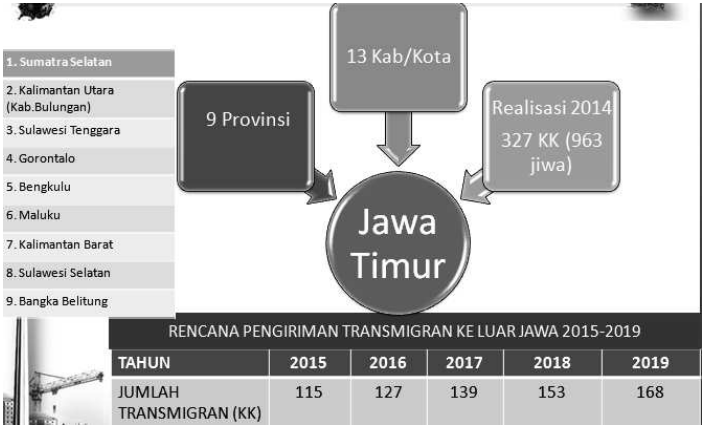

RENCANA PENGIRIMAN TRANSMIGRAN KE LUAR JAWA 2015-2019

TAHUN	2015	2016	2017	2018	2019
JUMLAH TRANSMIGRAN (KK)	115	127	139	153	168

Sumber: Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 2015

ARTIKEL-5

Menyosong Kecerahan Masa Depan Remaja dengan Karakter Cerdas dan Bermoral Mulia

ARTIKEL-5

Menyosong Kecerahan Masa Depan Remaja dengan Karakter Cerdas dan Bermoral Mulia

Dengan sedikit berseloroh, anda dapat membedakan pemuda di masa kini dan pemuda di masa lalu. Di antara jawabannya adalah, jika pumuda masa kini, ya yang seperti anda lihat di lingkungan Anda dan atau jumlah mereka seperti pada Tabel berikut ini, 66 juta (tahun 2015), namun pemuda di masa lalu, dalam kenyataan sekarang, mereka sudah menjadi orang tua, kakek-kakek, mungkin juga sudah menjadi moyang (buyut), jika saja sang pemuda di masa lalu tersebut masih hidup. Pertanyaan bernada seloroh ini sengaja diangkat untuk memulai dalam menulis artikel agara teras lebih ringan, nyaman, dan perlu untuk dibaca.

Yang menjadi fokus dalam artikel ini adalah pada penduduk kelompok usia remaja dan pemuda. Jumlah mereka yang berusia 10-24 tahun di Indonesia pada 3,5 dasawarsa terakhir, diperoleh gambaran (Lihat Tabel 3) bahwa jumlah mereka antara 56,5 juta pada tahun 1990 dan 69,6 juta pada proyeksi pada tahun 2035. Meskipun persentase terhadap total penduduk jumlah remaja dan pemuda tejadi penurunan dari 31,5% pada tahun 1990 dan 22,8% pada proyeksi tahun 2035. Namun saat dilihat dalam perspektif lingkungan alam, sosial, budaya dan ekonomi, sesungguhnya kondisi remaja dan pemuda kita sekarang dan dimasa yang akan datang tidaklah semakin mudah dan cerah.

Topik tentang penduduk berusia remja dan pemuda ini menjadi semakin relevan dibahas, terutama saat mereka dihadapkan pada tatanan dan tantangan dunia yang berubah secara lebih cepat atas lima hal yakni (i) jumlah penduduk bumi yang terus bertambah, pada tahun 2014 telah mencapai 7,2 milyar; (ii) kebutuhan terus meningkat dalam energi, pangan, air bersih, (ii) kuantitas dan kualitas sumber daya alam yang semakin melorot, yang diekspoitasi secara berlebihan; (iii) batas antar negara semakin terbuka, dengan penerapan MEA = Masyarakat Ekonomi ASEAN (2015) dan APEC (2020); (iv) jumlah Lansia di bumi ini pada 40 tahun ke depan mencapai angka 790 juta, yang para remaja dan pemuda tersebut hidup bersama mereka.

Pertama, jumlah penduduk bumi yang terus meningkat, mengharuskan para pemuda itu berkompetisi dengan para penduduk seumur tidak hanya di tingkat lokalnya sendiri, namun juga di tingkat nasional, regional, dan internasional. Potensi kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) yang tinggi harus terus diaktualisasasikan berupa kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan—intelektual dan keterampilan (*hard skill*), moralitas—kejujuran.

Kedua, kebutuhan yang terus meningkat untuk memenuhi jumlah penduduk yang mencapai lebih dari 7,2 milyar, hendaknya semakin ditingkatkan kemampuan produksinya, sementara penggunaan konsumsinya juga harus semakin dikendalikan dalam bidang energi, pangan, air bersih.

Ketiga, pasar bebas yang semakin terbuka dengan penerapan MEA = Masyarakat Ekonomi Asean (2015) dan APEC (2020), berarti juga bahwa kompetitor di bidang lapangan pekerjaan juga semakin ketat. Bahasa sebagai sarana komunikasi menjadi semakin diperhatikan oleh negara-negara yang siap merantau ke negara asing. Karenanya semakin marak pelaksanaan "Kursus Bahasa Indonesia" di negara-negara luar Indonesia seperti di China, dengan tujuan agar mereka dapat bekerja di Indonesia, baik pada perusahaan yang dikelola oleh pengusaha dari Indonesia maupun terutama pada perusahaan-perusahaan yang dikelola oleh Multinasional terutama China.

Keempat, para pemuda yang berjumlah 25,8% (tahun 2015) dari total jumlah penduduk itu, harus menanggung hidup penduduk Lansia yang pada 40 tahun ke depan mencapai angka 790 juta, yang kondisinya sudah tidak lagi produktif.

Penguatan Kesadaran Berencana

Masa depan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia, selayaknya terus kita tingkatkan kepeduliannya terutama untuk merebut dan mengisi peluang bonus demografi *(window opportunity of population)* yang terjadi hanya satu kali saja di Indonesia, di tahun 2020-2030. Jumlah penduduk yang besar, nomor empat terbesar di dunia, setelah China, India, dan Amerika itu, selayaknnya meningkatkan kualitas dengan cara, antra lain, merencanakan keluarga sejak dini yakni menikah di usia yang tepat, merencanakan jumlah anak melalui

kepesertaan dalam program KB (Keluarga Berencana), mendidik anak dengan cerdas yang menumbuhkembangkan generasi yang tangguh dan bermoral tak pernah mengeluh, serta merencanakan hari tua sejak dini.

Tabel 3. Jumlah Penduduk Usia Remaja dan Pemuda (10-24 tahun)

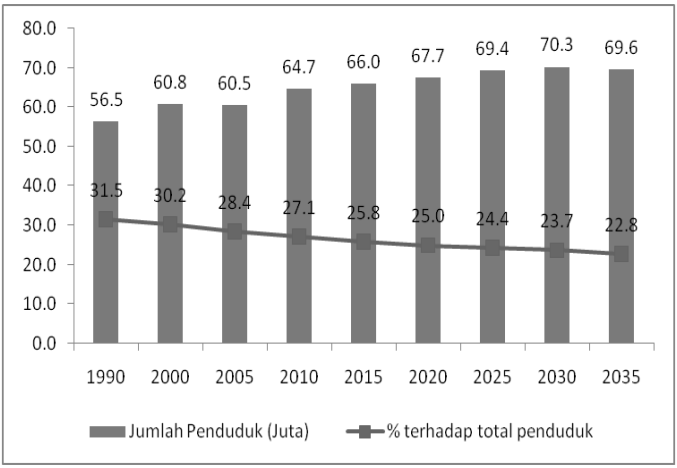

Perencanaan kehidupan berkeluarga yang berkualitas tingggi dilakukan dengan cara (i) melaksanakan usia ideal untuk menikah (20 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk pria); (ii) melahirkan anak pada usia ideal yaitu 20-34 tahun; (iii) menyiapkan jarak kehamilan yaitu tiga tahuh; (iv) menyiapkan kesehatan dan gizi yang perlu diperhatikan sebelum dan selama kehamilan seperti anemia; (v) memeriksakan secara tertib dan berkelanjutan pada saat

kehamilan; (vi) memperhatikan kesehatan dan gizi pada anak; (vi) memeriksakan secara rutin dan berkelanjutan kesehatan bagi bayi dan anak termasuk imunisasi; (vii) mengasuh anak, (viii) berkomunikasi dengan anak dan remaja; (ix) merencanakan sebagai orang tua dan hari tua sejak dini dalam hal pengelolaan ekonomi, sosial, dan mental; serta (x) menghindari perilaku BBM: Boros, Berpangku Tangan, dan Malas.

Cerdas dan Bermoral Mulia

Jumlah 25,8% atau 66 juta penduduk indonesia usia remaja dan pemuda usia 10-24 tahun, yang juga usia produktif, sesungguhnya merupakan angka yang membludak. Untuk menumbuhkembangkan masa depan yang lebih cerah, sudah selayaknya mengembangkan diri dalam dirinya sendiri sebagai remaja dan pemuda yang berkarakter cerdas dan bermoral mulia dengan cara; berani mencoba, berkarya dan terus bekerja; menemukan kesempatan dan merebut peluang; melakukan apa saja di lingkungan terdekat yang dapat dikerjakan dan menghasilkan secara halal; semakin tekun dan fokus; memulai berwirausaha sejak usia muda; semakin produktif, menjadi diri sendiri yang siap bekerja dan menolong kepada sesama di setiap saat, serta terus bekerja; aktif berkegiatan dalam masyarakat.

Lima kata kunci dalam menghadapi tantangan yang semakin tidak ringan di masa sekarang dan yang akan datang adalah menumbuhkembangkan potensi diri para remaja dan pemuda untuk (i) sehat fisik, sosial-budaya, dan psikis-mental;

(ii) intelektualitas; (iii) keterampilan (*skill*), dan (iv) karakter cerdas dan ber moral mulia. Kesehatan fisik dan mental sebagai modal dasar. Intelektual dan keterampilan sebagai modal produksi, dan karakter cerdas dan bermoral mulia sebagai pengendali gaya hidup yang boros, berpangku tangan, dan malas.[]

ARTIKEL-6

Memutus Matarantai Pernikahan Dini di Madura

ARTIKEL-6

Memutus Matarantai Pernikahan Dini di Madura

Masih segar dalam ingatan, saat saya menghadiri acara wisuda SMP (Sekolah Menengah Pertama), saat anak saya lulus tahun 2013 yang lalu. Seorang wakil guru menyampaikan sambutan pidatonya, antara lain menyatakan, "....silakah melanjutkan sekolah. Selepas lulus SMA (Sekolah Menengah Atas) nanti, anda harus segera menikah. Tidak usah berpacaran, agar dapat menghindari perbuatan dosa." Sejumlah wisudawan/wati yang menyimak "wejangan" gurunya tersebut, kelihatan tersipu. Sementara orang tua yang menyaksikan acara di sekolah yang berlokasi di mulut pintu masuk Laguna Indah wilayah Surabaya Timur tersebut, kelihatan tersenyum kecut mendengar pernyataan tersebut.

Karakteristik SMP, yang menyelenggarakan acara wisuda ini, tergolong kelas menengah dan atas, diukur dari SPP yang dibayarkan. Sekolah dalam pengelolaan non-pemerintah ini menyelenggarakan pendidikan dari tingkat TK (Taman Kanak-Kanak), SD (Sekolah Dasar), SMP, dan Perguruan Tinggi dalam naungan Yayasan pendidikan agama. SD dan SMP diselenggarakan sehari penuh (*full day*). Siswa dan siswi di tingkat SMP ditempatkan pada lokasi dengan pengelolaan terpisah, baik gedung dan ruang belajar. Pemisahan lokasi terutama dengan pertimbangan sudah mulai dewasa pada usia tersebut.

Saya sendiri terhenyak, saat mendengarkan sambutan dan wejangan di ruang perhelatan tersebut. Sambil merenung dan bergumam dalam hati, "...sebegitu teganya guru tersebut menyiapkan generasi masa depan mereka." Sambil terus berfikir dan bertanya kepada diri sendiri, tentang penduduk yang usia 18-an tahun (lulus SMP usia 15-an tahun), apakah telah memperoleh bekal yang memadai dalam hal pengetahuan dan keterampilan untuk dapat hidup mandiri,di era persaingan yang semakin ketat dalam ketenagakerjaan dewasa ini. "...Betapa teramat sayangnya, anak-anak remaja di usia tersebut harus berkeluarga, yang lelakinya harus menanggung beban ekonomi, sebagai tulang punggung keluarga. Sedangkan yang perempuan telah menanggung beban sebagai ibu rumah tangga, sebagai tulang rusuk, pendukung kehidupan keluarga." Pikir saya lagi.

Betapa teramat sayangnya, usia-usia tersebut sesungguhnya merupakan masa senang-senangnya para remaja untuk belajar ilmu pengetahuan-teknologi dan keterampilan di kampus perguruan tinggi. Harus terperangkap dalam kehidupan keluarga. Sejumlah kasus, mungkin dapat diterima. Saat anak tersebut dari kalangan keluarga yang secara ekonomi berkemampuan cukup tinggi. Harap tidak lupa, dalam kondisi demikina, yang berkemampuan ekonomi tinggi adalah orang tuanya. Kebutuhan nyata para anak remaja itu dan anak-anaknya kelak, yang juga menuntut dipenuhi kebutuhan dasar dan standarnya.

Pernikahan Dini

Penduduk usia 18 tahun, setamat SMA, yang dianjurkan menikah, sebagaimana disebutkan di bagian depan, sungguh disayangkan. Mereka kehilangan masa remajanya untuk membekali diri berupa ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk kemadirian hidup yang lebih baik. Sensus Penduduk tahun 2010, di Jawa Timur, rata-rata usia perama kawin bagi penduduk bergender perempuan adalah usia 19 tahun, sedangkan laki-laki berusia 21 tahun.

Terdapat disparitas yang tinggi, pada sejumlah kabupaten dan kota di Jawa Timur tentang usia pertama kali wanita kawin. Terdapat kabupaten atau kota yang sudah di atas angka rata-rata tersebut, namun untuk empat kabupaten di Pulau Madura dan kabupaten di "tapal kuda" wilayah utara Jawa Timur, angka tersebut masih tergolong sangat rendah.

Di Kabupaten Pemekasan, Kecamatan Waru, Desa Bajur, terdapat gejala sosial budaya yang menarik. Penelitian yang dilakukan Hairi (2009) di desa tersebut tentang "Fenomena Pernikahan di Usia Muda di Kalangan Masyarakat Muslim Madura," sangat menarik untuk dicermati. Dalam satu tahun saja terdapat delapan dari total 11 orang (72,8 %), yang menikah dalam usia di bawah 16 tahun bagi penduduk bergender perempuan dan 19 tahun bagi penduduk bergender lelaki (Lihat Tabel 4). Itu berarti, di daerah tersebut, mayoritas penduduknya melangsungkan pernikahan dalam usia muda yakni di bawah 16 tahun.

Tabel 4. Jumlah Penduduk yang Menikah di Usia Muda Di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan Tahun 2009

No.	Menikah	Jumlah Orang	Persentase
1.	Usia di bawah 16 dan 19 tahun	8	72,8 %
2.	Usia di atas 16 dan 19 tahun	3	27,2 %
3.	Total	11	100 %

Sumber: Hairi, Tahun 2009:68.

Lebih menarik lagi, dalam penelitian ini, Hairi mewawancarai sejumlah 13 orang informan yang menikah di usia muda. Gambaran yang diperoleh dari para informan ini adalah bahwa usia menikah dari para informan ini, yang bergender perempuan, tiga orang menikah dalam usia 16 tahun, lima orang yang telah menikah dalam usia 15 tahun, dua orang perempuan yang menikah pada usia 14 tahun, satu orang perempuan yang menikah pada usia 13 tahun, dan dua orang perempuan yang menikah pada usia 12 tahun. Para informan itu mengaku, alasan menikah bagi perempuan di usia muda adalah, enam orang yang menikah atas kemauan sendiri dan tujuh orang yang menikah atas dorongan orang tuanya.

Perhatikan data informannya, perempuan usia 12, 13, 14, 15, dan 16 tahun telah menikah dengan lelaki yang usianya

terpaut antara satu sampai empat tahun di atasnya. Mereka telah menikah dan atau berumah tangga dalam usia yang sangat muda. Usia remaja-siswa.

Empat Alasan

Terdapat empat alasan yang melatarbelakangi budaya nikah di usia muda ini yakni (i) ekonomi, (ii) pendidikan, (iii) agama, (iv) orang tua.

Pertama, Alasan ekonomi menjadi dasar pernikahan di usia anak remaja ini terutama dari kalangan keluarga yang berekonomi terbatas (baca: miskin) dengan maksud agar dapat melepaskan beban ekonomi keluarga dengan cara menikahkan anaknya, agar dapat diurusi oleh orang lain. Cukup beruntung saat keluarga yang mengambil menantu dari strata ekonomi yang lebih mapan, namun tragis apabila dari kalangan ekonomi yang juga terbatas. Kebudayaan kemiskinan menjadi semakin dilanggengkan di masyarakat ini, mengingat latar belakang orang tua di lokasi penelitian ini umumnya adalah bekerja sebagai petani.

Kedua, pendidikan yang terbatas. Di desa tempat penelitian ini dilakukan, rata-rata pendidikan yang ditamatkan adalah SD (Sekolah Dasar). Gejala ini juga sangat menarik, jarak desa Bajur dengan Kecamatan Waru tempat tersedianya jenjang pendidikan di atasnya yakni SMP "hanyalah" tujuh kilo meter. Sejarak itu pula kota kecamatan dan ibukota kabupaten Pamekaksan. Hanyalah 15 km jarak desa itu dengan ibukota Kabupaten Pamekasan. Bagi kalangan keluarga dengan latar

belakang ekonomi yang terbatas, jarak tersebut bukanlah suatu yang dekat. Tidak mudah bagi mereka untuk memfasilitasi anaknya untuk melanjutkan sekolah. Para anak remaja yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya, tidak terdapat alternatif lain kecuali memasuki arena pernikahan.

Ketiga, agama. Alasan agama (Islam) yang dipergunakan oleh para orang tua dan tokoh agama di lokasi penelitian ini dalam pernikahan di usia dini adalah agar dapat menyelamatkan para generasi remaja tersebut dari perbuatan dosa *(makshiyat)* baik kecil maupun besar (perzinahan). Anak remaja yang sudah *balligh* ("mimpi basah" bagi lelaki dan "haid" bagi perempuan), sudah mengerti tentang perbuatan "begituan." Pornografi melalui multi media juga telah merambah kawasan pedesaan. Hati orang tua dan para guru siapa yang tidak miris, misalnya kasus pornografi "mirip artis" itu juga dapat diakses oleh para remaja sampai di desa-desa. Jadi untuk menyelamatkan generasi remaja tersebut adalah dengan menikahkannya.

Keempat, orang tua yang di lokasi penelitian ini, pada zamannya, umumnya juga dinikahkan pada usia muda oleh orang tuanya. Perhatikan alasan pernikahan dini dalam penelitian ini yang mayoritasnya (7/13 informan) adalah didorong oleh orang tua. Tidak sedikit pula yang mendorong adalah generasi kakek atau neneknya dengan alasan ingin segera menimang cucu. Dengan kata lain seluruh komponen

masyarakat di lokasi penelitian ini memberikan support dan dukungan kepada tradisi menikahkan penduduk di usia dini.

Segenap aktivis kependudukan dan KB (Keluarga Berencana) di tanah air, sudah sewajarnya bekerja lebih ektra lagi melaksanakan Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi)nya untuk meningkatkan kepedulian dalam mengendalikan kuantitas dan meningkatkan kualitas penduduk. Perhatikan saja, di kota Surabaya, Ibukota Provinsi Jawa Timur, yang juga kota terbesar kedua di tanah air, setelah Jakarta, masih terdapat suara vokal dari sejumlah pendidik yang menganjurkan anak didiknya untuk melakukan pernikahan di usia dini. Apalagi di pedesaan seperti desa Bajur di Kabupaten Pamekasan ini. Segenap komponen bangsa juga selayaknya lebih peduli untuk memutus matarantai pernikahan dini melalui pendekatan kebudayaan inti *(core culture)* di Madura yang menjadikan *blue print* (referensi) bagi perilaku para warganya dalam *Buppa-Bebbu, Guru, dan Ratto* (Bapak-Ibu, Guru, Pejabat) baik pada level, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional.[]

ARTIKEL-7

Menetapkan Batas Usia Lansia Indonesia 65 Tahun (?)

ARTIKEL-7

Menetapkan Batas Usia Lansia Indonesia 65 Tahun (?)

Jawa Timur sebagai provinsi terbesar kedua jumlah penduduknya di Indonesia setelah Jawa Barat, telah menggagas untuk menyusun rekomendasi dalam kegiatan seminar yang bertema "Kajian Batas Usia 60 Tahun Penduduk Lansia di Indonesia". Seminar ini memperoleh arahan dan pembukaan oleh Wakil Gubernur Jawa Timur (Wagub Jatim) Bapak Drs. H. Saifullah Yusuf, berlangsung di Hotel Grand Trawas Hotel Kabupaten Kojokerto pada tanggal 27-28 Maret 2014. Tujuan seminar ini sebagaimana dikemukakan oleh panitia dalam pengantarnya adalah untuk meninjau kembali batas usia kelompok Lansia 60 tahun dan mengusulkan pada usia 65 tahun. Dalam sambutannya, Wagub Jatim mengundang para pakar dan audiens yang berjumlah 60-an orang dari kalangan perguruan tinggi, LSM, praktisi, dan SKPD terkait di Jawa Timur, agar dapat memberikan gagasan cerdas untuk pengelolaan warga Lansia.

Hadir dalam seminar ini pembicara dari Jepang (Igarashi Kumiko, RN., PhD.), dan Indonesia Prof. dr. Marlina S. Mahajuddin, Sp.Kj. (RSUD. Dr. Soetomo/FK Unair), Drs. Krinsayana Jahya, M.Sc. (Departemen Statistik ITS) dan Dr. H. Eddy Juwono Slamet, M.Sc. (Studi Pembangunan FEB Unair) Pembahas yang dihadirkan adalah Dr. Bagong Suyanto, M.Si., (Sosiolog Fisip Unair) dan Drs. H. Soebiantoro (Praktisi dari Blitar).

Potensi untuk dapat menetapkan batas usia Lansia pada angka 65 tahun telah didukung oleh minimal tiga argumen. *Pertama* oleh data BPS terutama pada hasil Sensus Penduduk (SP) tahun 1970, 1980, 1990, 2000, dan 2010. Rentang umur yang ditetapkan dalam struktur 65 tahun ke atas setelah penetapan usia produktif, usia sekolah, dan usia Balita. Pada sturktur data tersebut langsung dapat diperoleh angka dan persentasenya jumlah penduduk yang berusia 65 tahun ke atas. Apabila kita hendak mengetahui penduduk yang berusia 60 tahun ke atas maka kita harus menghitungnya tersendiri, secara manual. Artinya struktur komposisi penduduk dalam SP telah dimungkinkan untuk memperoleh data yang dimaksudkan itu secara otomatis. SP, seakan-akan telah menyediakan data itu untuk tujuan penetapan usia 65 tahun sebagai Lansia.

Kedua, terdapat kecenderungan umum bahwa penduduk di negara manapun di dunia ini AHH terus mengalami peningkatan. Sehubungan dengan hal tersebut sejumlah negara yang telah menetapkan usia Lansia pada angka 65 tahun seperti Jepang, Finlandia, dan Australia. Di Jepang sebagai misal telah menetapkan batas umur 65 tahun bagi Lansia pada tahun 2009 yang saat itu AHH untuk lelaki 79 tahun dan perempuan 86 tahun yang Komposisi penduduk Lansianya mencapai 28%.

Ketiga, penetapan Undang Undang RI Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia pada waktu itu didasarkan pada data AHH (Angka Harapan Hidup) penduduk Indonesia

yang berusia 63 tahun. Pada SP 2010 AHH penduduk Indonesia adalah 69 tahun. Berarti dalam kurun 15 tahunan telah melewati lebih dari angka lima tahun dari angka 60 tahun. Dapat diartikan sudah saatnya untuk mengusulkan penetapan batas usia Lansia adalah 65 tahun.

Mendasarkan pada ketiga argumen tersebut, dengan demikian apakah Indonesia (Jawa Timur) juga ikut-ikutan *(*Jawa: *latah)* untuk menggeser batas usia Lansia menjadi 65 tahun? Suasana seperti ini yang mengemuka dalam penyajian dan pembahasan seminar ini.

Tingkatkan Kwalitas Layanan

Potensi-potensi yang mengemuka untuk meningkatkan batas usia Lansia menjadi 65 tahun memperoleh sorotan yang tajam dari para penyaji. Sorotan tajam itu cendrung pada sikap pesimis untuk dapat dilaksanakan di Indonesia. Minimal terdapat empat argumen yang tergolong dalam alur ini. *Pertama* umur 60 tahun sebagai batas usia Lansia merupakan penetapan PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa). Indonesia adalah anggota PBB. Penggeseran batas usia Lansia menjadi 65 tahun juga akan merevisi dan atau meratifikasi kebijakan PBB. Pelanggaran kepada kebijakan tersebut kemungkinan berimplikasi kepada status kepesertaan Indonesia sebagai anggota PBB. Meskipun terdapat gagasan yang juga mengemuka bahwa tidak akan terjadi masalah apabila Indonesia melanggar ketentuan tersebut. Meskipun berimplikasi kepada berkurangnya anggaran—bila ada—yang dikucurkan PBB ke negara Indonesia. Terbukti, minimal telah

tiga negara, sebagaimana disebutkan di depan yang telah menetapkan batas usia Lansia dalam angka 65 tahun.

Kedua, batasan usia Lansia yang dilegitimasi oleh hukum, akan berimplikasi pada penundaan atas hak-hak yang sepatutnya diterimakan kepada Lansia. KTP seumur hidup, layanan diskon pada tiket transportasi, adalah merupakan contoh kecil. Struktur ketenagakerjaan berdasarkan pada umur yang semakin melebar. Rentang umur angkatan kerja menjadi bertambah tinggi, bagi warga senior ini, berimplikasi kepada bertambahnya jangka waktu untuk menikmati posisi ketenagakerjaan. Di sisi lain, pasar tenaga kerja yang berusia produktif harus berebut dengan penduduk yang berusia senior tersebut. Bagi penduduk berusia produktif haruslah menunggu sampai kursi yang dimaksudkan benar-benar telah ditinggalkan oleh pegawai yang akan pensiun.

Ketiga, secara substansial, terasa lebih bermanfaat apabila mengevalusi pelaksanaan batas usia yang telah ditetapkan yakni 60 tahun. Evaluasi terutama dimaksudkan untuk lebih mengoptimalkan kualitas layanan kepada warga Lansia. Delapan bidang layanan sebagaimana diamanatkan dalam UU RI Nomor 13 Tahun 1998 dan Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2007 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, hendaknya dievalusi. Layanan bidang kesehatan, sebagai misal, Poli Geriatri di Rumah Sakit daerah semakin terabaikan pelajanan dan pengembangannya. Sejumlah kabupaten dan kota telah menutup layanan tersebut. Penghargaan kepada petugas medis dan non medis juga dirasakan tidak memadai.

Puskesmas Santun Lansia sebagai percontohan di Kabupaten dan Kota juga kurang dan atau tidak memperoleh proporsi yang memadai untuk dapat ditingkatkan kapasitas dan kemampuannya. Penggeseran usia 65 tahun bagi Lansia menjadi ancaman yang besar bagi tenaga kesehaan dan masyarakat.

Dalam seminar itu, nyaris tidak terdapat argumentasi yang kuat untuk mendukung terealisasikannya penggeseran batas usia Lansia menjadi 65 tahun. Sehingga arah rekomendasi bukan pada angka tetapi lebih banyak kepada kwalitas layanan kepada Lansia.

Optimalisasi layanan kepada Lansia hendaknya tidak terperangkap pada badan/tubuh/fisik Lansia . Perhatian layanan kepada kesehatan fisik/tubuh/badan Lansia adalah penting. Namun, yang tidak boleh dilupakan adalah perhatian kepada layanan psikhis-mental-spiriual.

Kwalitas layanan kepada Lansia yang juga selayaknya dapat terus ditingkatkan terutama berbasis kepada kekayaan budaya kultural kita. Problem sering terjadi pada level masyarakat kelas menengah-atas. Mereka memiliki tuntutan yang berkadar tinggi. Terbiasa dalam kehidupan yang mandiri. Sejumlah diantaranya adalah berpengalaman dalam kepemimpinan. “power” yang pernah di perankan saat aktif, telah bergeser saat mereka harus melepaskan kesemuanya. Kesendirian dan kesepian *(lonely* dan *desolate)* merupakan problem yang sering dialami oleh Lansia.

Penurunan kemampuan fisik adalah merupakan sesuatu keniscayaan yang dialami oleh penduduk berusia panjang. Sangat mungkin terjadi pada kalangan Lansia itu, meskipun telah semakin terbatas kemampuan fisiknya, namun kemampuan nalar, kognisi masih terus dapat dimanfaatkan dengan percontohan dalam berbagai kearifan hidup ini bagi generasi bangsa yang harus terus lebih baik di masa sekarang dan yang akan datang.[]

ARTIKEL-8

Lansia Tangguh yang Tak Pernah Mengeluh

ARTIKEL-8

Lansia Tangguh yang Tak Pernah Mengeluh

Struktur Lansia (penduduk berusia 60+) telah terjadi di Indonesia sejak tahun 1990-an, saat politik dunia telah mengakhiri perang dingin dan awal lahirnya globalisasi. Populasi Lansia di Indonesia, khususnya hasil Sensus Penduduk (SP:1990) mencapai persentase 10.71% (jumlah penduduk 32.487.744), bandingkan pada satu dekade sebelumnya yakni pada SP 1980 yang 6,54% dari jumlah penduduk di Jawa Timur sejumlah 29.169.004.

UNFPA *(United Nations for Pupulation Fund Agency)*, telah menetapkan bahwa persentase penduduk di suatu Negara yang jumlah Lansia telah melebihi 6.5% maka negara tersebut telah memasuki struktur tua (Lansia). Berarti struktur kependudukan bangsa Indonesia telah menua pada hampir seperempat abad yang lalu pada tahun 2014 ini. SP tahun 2010, menunjukkan data 11% lebih dari jumlah penduduk jawa Timur yang mencapai lebih dari 38 juta jiwa.

Pelajaran yang dapat dipanen dari persentase kondisi Lansia tersebut, terangkum pada kewaspadaan terhadap karakter negative dan kesadaran pada peningkatan karakter positif yang telah melekat pada para warga berusia senior itu.

Empat *Post Power*

Terdapat empat kewaspadaan yang selayaknya terus kita tingkatkan bagi pengembangan yang lebih baik bagi lansia kita, di masa sekarang dan yang akan datang. Belajar dari penerapan teori Termo Dinamika II, bahwa perilaku seseorang berkecenderungan menempati posisi pada kondisi semula. Saat seseorang terbiasa untuk bergerak dalam kegiatan organisasi birokrasi pemerintah dan non pemerintah, maka mereka berkecenderungan terus aktif bergerak di manapun mereka hidup di masyarakat. Kebiasaan seseorang yan aktif dalam organisasi siswa (SD, SMP, SMA) dan mahasiswa, maka berkecenderungan untuk terus aktif dalam kegiatan-kegiatan dalam organisasi dan kemasyarakatan. Begitu pula sebaliknya, saat seseorang dan atau sekelompok orang terbiasa dengan pasif (tidak aktif), maka pada posisi itu pula kecenderungan perilaku kesehariannya.

Bagi penduduk Lansia yang terbiasa aktif dalam kegiatan organisasi dan kemasyarakatan, juga terdapat kewaspadaan yang selayaknya terus kita tingkatkan kehati-hatianya. Kewaspadaan itu antara lain terhadap gejala empat *post power* berikut.

Pertama, pensiunan Lansia yang pernah menduduki jabatan dalam suatu organisasi atau birokrasi pemerintah dan non pemerintah akan berkecenderungan terkena atau mengidap penyakit yang disebut sebagai *post power syndrome (PPSy)*. Indikator bagi orang yang terkena penyakit PPSy adalah sejumlah perilaku yang nyaris dalam setiap

kesempatan—apalagi diminta, tidak dimintapun ia mengataka itu—"jaman saya jadi pimpinan di suatu birokrasi atau lembaga tertentu, yang saya lakukan adalah……." Termasuk ungkapan populer yang juga dapat dibaca pada iklan pariwara, stiker dan foto-foto di berbagai media, misalnya "piye…… enak jamanku to….. (Bagaimana khabarnya, ……. nyaman pada zaman saya khan….)"

Kedua, pensiunan dosen dan pengajar, atau guru, waspadalah bahwa anda berkecenderungan terkena atau mengidap penyakit yang disebut sebagai *post power point (PPP)*. Kebiasaan untuk membuat atau menggunakan *power point* saat mengajar atau member ceramah, terbawa-bawa sebagai perilakunya kesehariannya meskipun kegiatan itu dilakukan di wilayah kampung pada masyarakat awam. Para penceramah agama pada perkembangan terakhir juga menggunakan *power point,* meskipun belasan slide yang ditayangkan nyaris berisi kata-kata semuanya, perkecualian satu gambar foto *selfy* tentang dirinya. Penceramah ini mengaku dalam menggunakan multi media *up to date* ini, terdorong oleh komunitas koleganya yang telah menggunakannya terlebih dahulu. Tipe orang seperti ini juga bersemangat untuk menyedot (*download*) dari internet atau mengkopi materi *power point* dari para penceramah saat mereka mengikuti suatu kegiatan seminar dan atau lokakarya.

Ketiga, pensiunan *driver* atau Sopir, waspadalah bahwa anda berkecenderungan *terkena* atau mengidap penyakit yang disebut sebagai *post power steering (PPSt)*. Indikator orang

yang terkena penyakit PPSt adalah nyaris dalam setiap kesempatan, meskipun tidak diminta, ia menceritakan betapa nyamannya dalam melaksanakan tugas sebagai sopir dari seorang pejabat tinggi yang mobilnya dilengkapi dengan fitur-fitur lengkap serba *electric* dan bahkan dengan "layar sentuh" yang tersedia di kemudi mobilnya. Pada posisi itu, jari tangan sang Sopir tinggal menekan tombol dan atau menyentuh ikon yang tersedia pada papan dekat steer atau kemudi mobil yang dikemudikannya. Setelah pensiun, ia kembali menggunakan kendaraan pribadinya, yang tanpa fasilitas *power steering*. Sehingga orang terebut, harus menggunakan tenaga ekstra besar terutama saat menggerakkan roda mobil untuk menempatkannya pada posisi yang tepat dalam lokasi parkir. Atau sekedar membuka kaca jendela dan atau menggeser kaca spion di sebelah kanan dan atau kiri yang menggunakan tenaga dirinya.

Keempat, *Post Power confortable* (PPC). Saat orang telah terbiasa dengan fasilitas dan kenyamanan-kenyamanan yang telah diterima dalam kesehariaanya, antara lain melalui *drive thru* Kuliner KFC, Samsat, ATM, atau transportasi dengan moda travel. Seseorang dan atau sekelompok orang berkecenderungan untuk memprotes atau komplein kepada perubahan layanan yang diberlakukan oleh sejumlah instansi. Sebagai missal, komplein atau protes, saat "akan" dicabutnya subsisi BBM Premium pada pasca pelantikan Presiden ke-7 RI—yang sejatinya subsidi tersebut diperuntukkan bagi penduduk yang berkemampuan terbatas di tanah air. Terbiasa

“hanya” duduk di jog kendaraan sejak dari halaman rumah sampai ke halaman kantor, seseorang berbicara meluap-luap untuk memprotes kebijakan tersebut, saat harus turun dari kendaraan pada lokasi “drop zone”. Ketika saya konfirmasi seorang itu memberi jawaban “malas” untu berjalan kaki menuju lokasi yang biasanya dapat diantarkan sampai halama kantor tersebut.

Tangguh dan Tidak Mengeluh

Pelajaran yang dapat diunduh dari ke-empat point tersebut, adalah bahwa terdapat kecenderungan untuk “selalu” protes, komplein, dan mengkritik dari penduduk Lansia (dan Lansia Awal), atas berbagai hal yang mereka temui di lingkungan diri, keluarga, masyarakat, birokrasi, dan apapun yang mereka jumpai. Di mata orang tersebut, nyaris, tidak satupun hal yang baik atau cocok dengan kehendaknya. Sehingga nyaris kita jumpai pada saat kapanpun dan dimanapun “tiada hari tanpa komplein” pada orang itu. Pada Lansia demikian sesungguhnya telah mengidap penyakit SMS (Senang saat Melihat Susah dan Susah saat Melihat Senang). Tiada hari tanpa mengeluh.

Komplein pada intinya adalah berbagai perilaku yang terekspresikan seseorang tentang diri dan lingkungannya melalui bahasa yang diungkapkan dalam bentuk negatif berupa keluh, gerutu, sebagai cerminan dari perasaan susah, sedih, sakit, menderita, kecewa, kesal, dan gelisah. Komplein yang diungkapkan oleh seseorang senyatanya juga masih dapat dimaknai positif, sekiranya dilengkapi dengan data yang

memadai. Tetapi akan semakin menjadi bumerang—yang dapat menghancurkan dirinya sendiri—apabila data yang dikemukakan bersifat sumir, tidak akurat.

Kecenderungan untuk berbicara secara vocal (dapat dibaca: anggota bina vokalia???) yang dilakukan oleh sejumlah Lansia adalah baik. Lebih utama lagi adalah vokalitas yang umumnya telah melekat pada Lansia dengan predikat sejumlah *post power* sebagaimana diuraikan pada alenia sebelum ini—dapat disertai dengan kesadaran bahwa setiap ungkapan yang dikemukakan memiliki resonansi atau pengaruh kepada citra diri dan lingkungannya.

Adalah tugas kita bersama yakni pemerintah—sebagai penyelenggara Negara, dan masyarakat sebagai warga Negara yang di dalamnya juga terdapat pengusaha—untuk terus menumbuhkembangkan kondisi Lansia yang berpredikat "tangguh dan tidak pernah mengeluh." Kwalitas Lansia semacam ini yang jumlahnya di lingkungan kita harus ditambah sebagai prototype dari Lansia yang sehat (jasmani-ruhani), mandiri dan berguna. Sadarilah, bahsa sesungguhnya, mengeluh tidaklah pernah menyelesaikan permasalahan.[]

ARTIKEL-9

Syahwat Jawa Timur dalam Meningkatkan Kesejahteraan Lansia

ARTIKEL-9

Syahwat Jawa Timur dalam Meningkatkan Kesejahteraan Lansia

Perda (Peratuan Daerah) Lansia (Lanjut Usia) merupakan bagian dari perundangan yang berfungsi sebagai landasan (payung) hukum yang berkekuatan tetap Begitu pula dengan Komda (Komisi Daerah) Lansia, meskipun bersifat *adhoc*, sangat diperlukan kehadirannya untuk melaksanakan tugas dalam upaya meningkatka kesejahteraan kepada Lansia di suatu daerah.

Sejak ditetapkannya Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2007 tentang Kesejahteraan Lansia disusul dengan Komda (Komisi Daerah) Lansia melalui SK Gubernur Jawa Timur (tahun 2007 dan tahun 2011), Komda Lansia Jawa Timur telah melakukan pemantauan (monitoring) di tiga wilayak kabupaten/kota pada tahun 2010 (Kota Probolinggo, Kabupaten Jember, dan Kabupaten Pamekasan); tahun 2011 di tujuh wilayah Kabupaten/kota (Kabupaten Kediri, Tulungagung, Madiun, Pacitan, Tuban, Sumenep, dan Lumajang); tahun 2012 pada 12 kabupaten/kota (Kabupaten/Kota Surabaya, Kediri, Kabupaten Lamongan, Bojonegoro, Ngawi, Ponorogo, Nganjuk, Bangkalan, Banyuwangi, Kediri, dan Bondowoso); pada tahun 2014 pada sembilan kabupaten/kota (Kabupaten Sidoarjo, Mojokerto, Pasuruan, Magetan, Probolinggo, Bondowoso, Gresik dan Kota Mojokerto).

Dari kegiatan pemantauan tersebut, diperoleh gambaran bahwa sampai tahun 2014 di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, telah terdapat delapan kabupaten/kota yang telah menetapkan Perda. Kabupaten/kota yang telah menetapkan Perda tentang Kesejahteraan Lansia adalah Kota Probolinggo (Perda No. 2 Tahun 2009), Kabupaten Mojokerto (Perda No. 2 tahun 2010), Kabupaten Sidoarjo (Perda No. 04 tahun 2010), Kabupaten Madiun (Perda No. 06 tahun 2011), Kabupaten Bojonegoro (Perda No. 24 tahun 2011), Kabupaten Trenggalek (Perda No. 24 tahun 2011), Kabupaten Pamekasan (Perda No. 05 tahun 2012), Kabupaten Pasurun (Perda No. 3 tahun 2013), Kabupaten Bangkalan (Perda No. 06 tahun 2013), dan terakhir sekaligus terbaru, serta satu-satunya di tahun 2014 adalah Kota Surabaya (Perda No. 3 tahun 2014).

Sementara, telah terdapat 18 wilayah kabupaten/kota di Jawa Timur yang menetapkan Komda melalui Keputusan Bupati/Walikota yaitu Kota Probolinggo (2009), Kabupaten Jombang (2010), Kota Kediri (2011), Kota Madiun (2011), Kabupaten Bangkalan (2011), Kabupaten Lamongan (2011), Kabupaten Madiun (2011), Kabupaten Nganjuk (2011), Kabupaten Pacitan (2011), Kabupaten Sidoarjo (2011), Kabupaten Ponorogo (2012), Kabupaten Ngawi (2012), Kota Surabaya (2012), dan Kabupaten Trenggalek (2013). Tiga kabupaten berikut juga telah terbentuk Komdanya yaitu Kabupat Gresik (2011), Kabupaten Pamekasan (2013), dan Kabupaten Sumenep (2014).

Syahwat

Keberhasilan Jawa Timur dalam menetapkan landasan hukum berupa Perda tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, dilengkapi dengan Perda di delapan kabupaten/kota sampai tahun 2014 tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari tekad, minat, hasrat, dan kemauan yang tinggi (baca: *syahwat*) dari segenap komponen pemangku kepentingan (*stake holders*), baik pada pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat di Jawa Timur untuk meningkatkan kesejahteraan kepada Lansia. Penduduk Jawa Timur, menurut SP (Sensus Penduduk) tahun 1980 jumlah Lansia berusia 60+ telah mencapai 9,37 %, yang menurut PBB telah memasuki struktur tua (*old population*).

Setelah penetapan Perda 5/2007 dan dilengkapi dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, dilakukanlah sosialisasi tentang hal tersebut di 38 kabupaten/kota. Secara bertahap respons konkrit telah ditunjukkan oleh kabupaten/kota berupa penetapan Perda dan pembentukan Komda. Perda ini terasa penting sebagai payung hukum yang berkekuatan tetap untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam peningkatan kesejahteraan Lansia yang dilakukan oleh, dari, dan untuk Lansia di kabupaten/kota sehubungan dengan era otonomi daerah terutama dalam hubugannnya dengan penetapan anggaran kegiatan, sebagai bagian dari bentuk besarnya syahwat atau komitmen.

Semakin Peduli

Rekomendasi yang diusulkan kepada Gubernur Jawa Timur untuk ditindaklanjuti melalui kegiatan pemantauan (monitoring) yang dilakukan oleh Komda Lansia Provisi Jawa Timur di sembilan kabupaten/kota pada tahun 2014 adalah meningkatkan kepedulian para Bupati/Walikota untuk menambah dukungan anggaran yang memadai melalui APBD untuk meningkatkan kegiatan dalam delapan bidang layaanan (Pasal 8 Perda Provinsi Jatim nomor 5/2007).

Kedelapan bidang layanan adalah (i) pembinaan keamaan dan mental spiritual. Koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah akan lebih efektif dan optimal dalam melakukan layanan keagamaan dan spiritual; (ii) pelayanan kesehatan, lebih difokuskan pada layanan dengan pola Puskesmas Santun Lansia; (iii) pelayanan kesempatan kerja terutama bagi Lansia yang masih potensial, peran PemKab/Kota ditingkatkan untuk mengkoordinasikan dengan dunia usaha; (iv) peayanan pendidikan dan pelatihan peran Pemda sangat diperlukan untuk mengatur dan mengkoordinasikan dengan harapan cakupan pendidikan dan pelatihan secara lebih luas dan merata; (v) kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum, direkomendasikan untuk menyediakan sarana dan prasarana rekreasi dan olah raga misalnya "Taman Lansia" yang mendukung kebugaran dan kesehatan Lansia. Diperlukan dukungan juga penyediaan sarana bangunan umu seperti toilet, pegangan tangan, dan *ramp*; (vi) kemudahan layanan

dan bantuan hukum diharapkan Pemda lebih mengaktifkan dan memberdayakan LK3 (Lembaga Konsultasi Kesejahteran Keluarga); (vii) perlindungan sosial diperlukan penyuluhan yang lebih intensif kepada masyarakat tentang pentingnya keberadaan dan fungsi Panti Lansi sebagai lembaga perlindungan bagi Lansia; (viii) bantuan sosial perlu ditingkatkan cakupannya oleh Pemda (kab/kota).

Penguatan kelembagaan berupa Komda Lansia dan juga Karang Werda juga menjadi perhatian dalam pemantauan ini. Sejumlah Karang Werda yang terbina dan berfungsi secara memadai terdapat di Kabupaten Mojokerto, dan Sidoarjo. Peringatan HLUN (Hari Lanjut Usia Nasional) pada setiap tanggal 29 Mei, umumnya bersifat seremonial dan momentual yang dapat diisi dengan kegiatan peningkatan pembinaan dan kesejahteraan kepada Lansia, melalui lomba pembinaan dan Prestasi Karang Werda.

Kegiatan pemantauan sebagaimana dilaksanakan oleh Komda Lansia Provinsi Jawa Timur, ini bermanfaat tidak saja untuk mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang terutama berkaitan dengan amanah Undang Undang RI Nomor 13 tahun 1998 dan Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 5 tahun 2007 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, namun juga sebagai stimulan dalam meningkatkan komitmen bagi Bupati dan atau Walikota untuk semakin peduli kepada peningkatan kesejahteran Lansia sesuai dengan kewenangan dan proporsinya.[]

ARTIKEL-10
Teror Kependudukan oleh Para Remaja

ARTIKEL-10

Teror Kependudukan oleh Para Remaja

Indonesia, hanya membutuhkan waktu 40 tahun saja untuk mencapai jumlah penduduk sebanyak setengah milyar jiwa, dari 255 juta jiwa pada tahun 2015. Angka setengah milyar itu, merupakan peningkatan dua kali lipat (200%)nya, dengan tingkat LPP (Laju Pertumbuhan Penduduk) 1,49% pertahun. Jumlah sepertempat milyar saja pada tahun 2015 ini sudah merupakan angka yang menyesakkan, apalagi setengah milyar penduduk pada tahun 2055. Lihat saja buktinya, libur nasional akhir tahun 2015 dan awal tahun 2016 yang baru berlalu, sejumlah 2,6 juta mobil / kendaraan yang masuk di jalan tol Cikampek. Dibutuhkan waktu sembilan jam untuk dapat melampaui Jakarta-Cikampek tersebut. Karenanya pula, seorang Dirjen Perhubungan harus mengundurkan diri dari jabatannya.

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir saja, penduduk Indonesia telah bertambah 17 juta jiwa. Merupakan angka yang setara dengan separuh penduduk di Provinsi Jawa Timur, berdasarkan SP (Sensus Penduduk) tahun 2010 yang berjumlah penduduk 238 juta jiwa. Pemerintah melalui BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana), bertekat untuk menurunkan LPP nasional dari 1,49% pertahun menjadi 1,38% petahun melalui Renstranya. Jika gagal dalam melaksanakan tekat tersebut, maka bukan mustahil, penduduk Indonesia akan mencapai jumlah setengah milyar.

Remaja

Fertilitas, merupakan penyumbang angka tertinggi dalam LPP. LPP Jawa Timur (0,69) masih berada di bawah angka nasional, selama lima kali SP (Sensus Penduduk). Namun, pada satu dekade terakhir mengalami stagnan, nyaris tidak bergerak, untuk nasional di kisaran angka 1.44 – 1.49, sedangkan Jatim di bawahnya yakni angka 0,9 dan 0,76 (Tabel 5). Begitu pula TFR (*Toral Fertility Rate*, angka kelahiran total)nya, di Jatim berjumlah 2,3% lebih rendah dari rata-rata angka di tingkat nasional yang 2,6 (SDKI, 2013). Berdasarkan SP tahun 1971-2010, TFR Jatim, masih berada di bawah angka nasional (Tabel 6.), namun ASFR(*Age Specific Ferility Rate*) di Jawa Timur, tergolong sangat tinggi, terutama pada kelompok tertentu pada usia remaja. ASFR adalah angka yang menunjukkan banyaknya kelahiran per 1000 perempuan pada kelompok umur tertentu. Angka ASFR di Jatim sudah melampaui rata-rata nasional (Tabel 7.).

Tabel 5. LPP (Laju Pertumbuhan Penduduk), Perbandingan Nasional dan Jawa Timur Tahun 1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010.

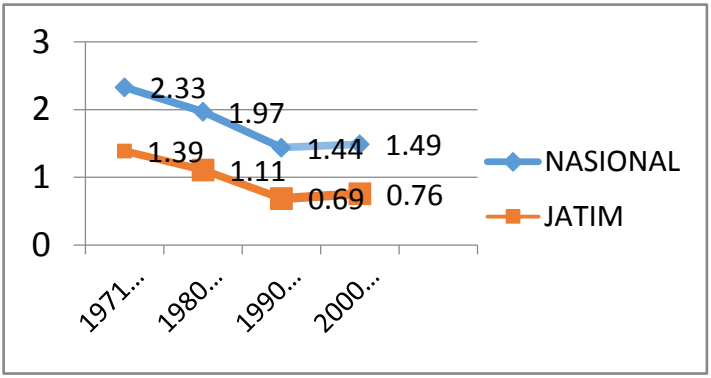

Sumber: SP 2010.

Tabel 6. Perbandingan TFR Indonesia dan Jawa Timur (1994, 1997, 2002, 2007, 2012)

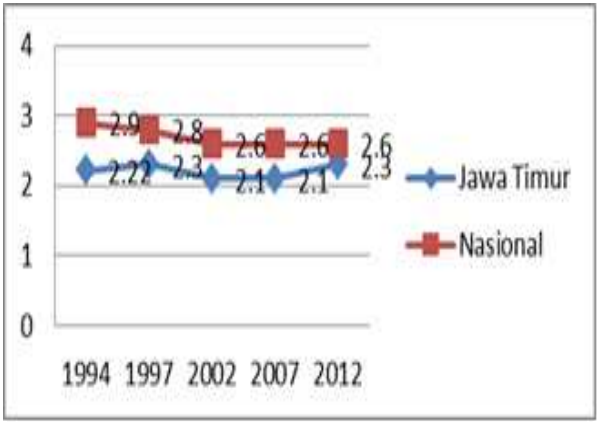

Sumber: SDKI, 2013

Data SDKI (2013), angka rata-rata ASFR Jatim pada tahun 2007 adalah 66, sedangkan nasional adalah 51. Meskipun angkanya sudah berhasil diturunkan sampai angka 53 pada tahun 2012, namun masih melampaui angka nasional yang rata-rata 48. Rawannya angka ASFR Jatim, bukan saja terdapat pada tingkat fertilitasnya yang tinggi dan waktunya yang panjang, pada usia remaja, sampai di masa depan, namun juga jumlah populasinya yang juga dominan. Populasi remaja usia 15-19 tahun mencapai angka 3.007.412 jiwa (Tabel 8), merupakan jumlah yang juga sangat tinggi.

Tabel 7. ASFR (Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 , pada Tahun 1994 - 2012

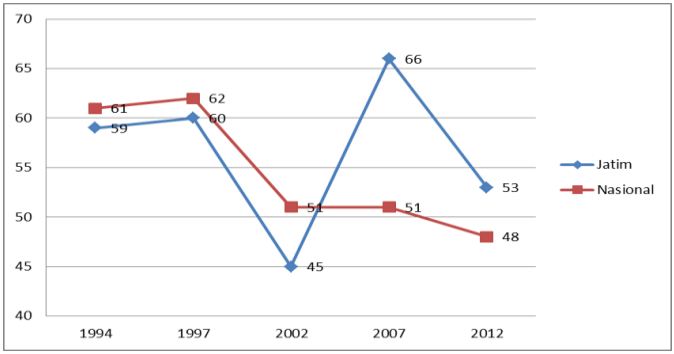

Sumber: SDKI, 2013.

Angka ASFR di Jatim pada kelompok remaja (usia 15-19 tahun) pada tahun 2012-2013, yang tergolong tinggi, terutama pada 12 dari 38 daerah Kabupaten/kota berikut ini yakni: (i) Bondowoso (118,74); (ii) Malang (53,55); Situbondo (67,32); Probolinggo (70,90), Sampang (51,72); Batu (55,95); Sumenep (59.70); Pacitan (47,92); Lumajang (46,96); Jember (71,26);

Pasuruan (61,10); dan Trenggalek (72,15). Kecuali dua yang terakhir, sepuluh daerah tersebut berlokasi di wilayah timur dari Jatim.

Dua penyebab kelahiran di usia muda sebagai pendongkrak, baca teror kependudukan, bagi tingginya ASFR adalah: hamil di luar nikah dan menikah di usia muda (pernikahan di usia dini). Dua hal ini, bukan hanya rawan untuk menurunkan kadar kualitas kependudukan pada umumnya, juga rawan untuk menghacurkan bagi dirinya sendiri. Tingginya angka ASFR, dengan kelahiran di usia muda, beresiko kepada penurunan kadar kualitas diri dalam kesehatan, ekonomi, dan sosial-pendidikan. ASFR beresiko kepada Kespro (Kesehatan Reproduksi) ibu yang juga mendongkrak AKI (Angka Kematian Ibu) dan AKB (Angka Kematian Bayi). Pada sisi ekonomi, mereka belum memiliki penghasilan memadai yang ditambah beban dengan menafkahi anak dan berpotensi untuk terperangkap dalam kemiskinan. Dari sisi sosial-pendidikan, mereka telah terpasung potensinya untuk mengaktualisasikan potensi dirinya dalam penguasan ilmu pengetahuan dan keterampilan.

Tabel 8. Frekuensi dan Persentase Penduduk Jawa Timur Berdasarkan Kelompok Remaja Umur 15-19 Tahun

Group Age	**Male**	**Female**	amount
15-19	1.518.179 (50,48%)	1.489.233 (49,52%)	3.007.412 (100%)

Sumber: SP 2010.

Rekomendasi

Lima solusi sebagai rekomendasi untuk mengendalikan teror kependudukan oleh para remaja dengan meningginya angka ASFR, adalah (i) menggalakkan edukasi di kalangan remaja terkait dengan Kespro, pendidikan karakter cerdas dan bermoral mulia agar terhindar dari perilaku seks bebas, Narkoba-Psikotropika-Zat adiktif, dan HIV AIDs; (ii) menguatkan kebijakan usia pertama bagi perempuan untuk menikah menjadi di atas 21 tahun; (iii) memperbanyak jumlah dan meningkatkan kualitas kader Genre (Generasi beRencana) dengan intensifikasi kegiatan berkaitan dengan penyadaran kehidupan berkeluarga yang sehat, sejahtera, bahagia, dan mulia; (iv) mendampingi remaja dalam perencanaan masa depan untuk mengkonstruksi struktur Keluarga Kecil Sejahtera, Bahagia dan Mulia (KKSBM); dan (v) meningkatkan kewaspadaan yang tinggi tentang terbukanya akses TI (Teknologi Informasi) yang semakin bebas, nyaris tanpa batas, di waktu kapanpun dan di tempat manapun, melalui HP (Hand Phone) dan Gadget yang berbasis pada internet.

Adalah keniscayaan yang tidak dapat ditunda untuk meningkatkan sinergitas yang lebih optimal dalam menjalin kerjasama inter dan antar berbagai momponen pamangku kepentingan (*stake holders*) untuk menurunkan angka ASFR melalui unsur di luar dan di dalam diri para remaja. *Pertama,* unsur dari luar berupa komitmen pimpinan terutama di lembaga pemerintahan dan jajarannya, sungguh dipertaruhkan

untuk mengendalikan jumlah dan meningkatkan kualitas penduduk. Optimalisasi peran kelembagaan dan personal di BKKBN, SKPD terkait di pemerintah kabupaten/kot; (ii) Organiisasi sosial kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat; (iii) lembaga pendidikan formal di tingkat dasar, menengah, dan perguruan tinggi, juga pendidikan informal, da non-formal; (iii) badan usaha pemerintah dan non pemerintah.

Kedua, komitmen dari luar begitu pentingnya, lebih signifikan lagi adalah komitmen yang bangkit dari dalam internal yang dilakukan oleh, dari, dan untuk para remaja sendiri. Berbagai kegiatan yang melibatkan para remaja sebagai pelaku utama dalam menguatkan dirinya untuk meningkatkan produktivitas yang tinggi adalah kebijakan yang selayaknya terus dikuatkan, secara berkesinambungan di masa sekarang dan yang akan datang.***

ARTIKEL – 11
Menguatkan Kelembagaan Pusat Studi Kependudukan

ARTIKEL – 11
Menguatkan Kelembagaan Pusat Studi Kependudukan

Situasi kependudukan Indonesia saat ini dinilai masih kurang menguntungkan, baik yang berkaitan dengan kuantitas, kualitas, administrasi kependudukan, maupun mobilitas atau persebaran penduduk. Hasil Sensus Penduduk 2010 menunjukan jumlah penduduk di Indonesia terus meningkat mencapai 237.641.326 jiwa pada tahun 2010 dengan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) yang cukup tinggi yaitu 1,49 persen. Pada satu tahun kemudian (tahun 2011) jumlah penduduk Indonesia dapat dipastikan telah menjadi sekitar 241 juta jiwa. Jumlah penduduk yang besar ini telah membawa Indonesia menduduki posisi ke-4 sebagai negara dengan penduduk terbesar di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga telah mengamanatkan bahwa pengelolaan kependudukan sebagai satu kesatuan dengan keluarga berencana dalam satu organisasi. Hal tersebut, diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan KB Nasional. Dengan adanya Undang-Undang dan Perpres ini diharapkan dapat lebih memperkokoh pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana dalam mendukung terwujudnya rencana pembangunan jangka panjang nasional, dan mewujudkan visi

dan misi BKKBN, yakni; penduduk tumbuh seimbang 2015 serta pembangunan berwawasan kependudukan.

Dalam upaya penyerasian kebijakan kependudukan untuk mewujudkan misi BKKBN dan sejalan dengan perubahan peran strategis, BKKBN memerlukan SDM pegawai maupun mitra kerja yang kompeten dan profesional yang memahami dan yang mampu merumuskan kebijakan tentang kependudukan. Peningkatan kapasitas *(capacity building)* sumber daya manusia para mitra kerja merupakan salah satu upaya terpadu dalam rangka membantu mengatasi berbagai isu kependudukan. Peningkatan kapasitas para mitra kerja ini juga sangat penting untuk mengembangkan berbagai upaya dan strategi dalam mewujudkan visi dan misi BKKBN.

Untuk maksud tersebut BKKBN bekerjasama dengan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan workshop yang substansi *capacity building* meliputi *overview* pembangunan kependudukan, teori, peluang dan prospek pembangunan kependudukan, kebijakan kependudukan serta manajemen pengembangan Pusat Studi Kependudukan di masa yang akan datang. Materi tersebut dikaji secara teoritis maupun pengalaman praktis dalam berbagai studi pada level lokal, regional, nasional, maupun internasional.

Tujuan umum workshop ini adalah untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kemampuan analisis, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan pembangunan berwawasan kependudukan. Adapun tiga tujuan khusus yang hendak dicapai adalah (i) meningkatnya

pengetahuan mengenai isu-isu utama pembangunan yang berkaitan dengan kependudukan; (ii) meningkatnya kemampuan dalam mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan pembangunan berwawasan kependudukan; dan (iii) meningkatnya kapasitas pengelola dalam mengembangkan pusat studi kependudukan di seluruh provinsi di Indonesia.

Workshop yang mengusung tema *Capacity Building* Kependudukan Bagi Para Mitra Kerja Yang Terlibat Pengkajian Kependudukan ini dilaksanakan pada tanggal 17 sd 20 Juni 2012 bertempat di Hotel Saphir, Jl. Laksda Adisucipto No. 38, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hadir sebagai peserta workshop ini 40 orang pejabat atau pengelola pada Pusat Studi Kependudukan (PSK) di 33 Provinsi—penulis adalah wakil dari Provinsi Jawa Timur—ditambah dengan 7 orang staf dari BKKBN Pusat (Lihat Foto Bersama para Peserta Workshop di Auditorium Gedung Masri Singarimbun PSKK UGM). Adapun output atau hasil yang diharapkan setelah mengikuti workshop ini adalah peserta mampu menyusun rumusan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan pembangunan berwawasan kependudukan dalam bentuk kajian dan analisis.

Foto 4. Peserta Workshop *Capacity Building* Kependudukan 2012

Peserta Workshop foto bersama Direktur PSKK UGM Prof. Dr. Muhajir Darwin di Auditorium Gedung Masri Singarimun UGM 19/6/12.

Dalam workshop ini diberikan penyegaran orientasi dan pembekalan oleh narasumber Dr. Ida Bagus Permana, M.Sc. dari pejabat struktural BKKBN tentang "Kebijakan Pembangunan Kependudukan dalam Pencapaian MDGs". Pembekalan mengenai teknis substantif diberikan oleh Prof. Dr. Muhajir Darwin yang juga Kepala Pusat Studi Kebijakan Kependudukan (PSKK) Universitas Gajah Mada (UGM), Yogyakarta dengan topik "Kebijakan Pembangunan Kependudukan dalam Konteks Politik dan Otonomi Daerah". Staf dari PSKK UGM, lainnya adalah Drs. Tukiran, MA. membahas topic "Menyikapi Kegagalan Pencapaian MDGs' di Indonesia"; Agus Joko Pitoyo membahas topic "Kebijakan Fertilitas dan Perumusan Isu Strategis"; Eddy Kiswanto, S.Si., M.Si., membahas "Kebijakan Mortalitas dan Perumusan Isu

Strategis"; Dr. Setiadi, M.Si., membahas "Kebijakan Mobilitas Penduduk dan Perumusan Isu Strategis"

Otonomi Pusat Studi: Gunakan "Pancasila"

Pada hari ketiga (19/06) workshop dilaksanakan di PSKK UGM antara lain diberikan materi "Renstra dan Jejaring Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM" oleh Kepala PSKK Prof. Dr. Muhajir Darwin. Pada kesempatan tersebut dijelaskan sepak terjang lembaga ini dalam melaksanakan kegiatannya. Lembaga ini sejak berdiri 1 April 1973 telah berganti nama tiga kali. Saat berdirinya bernama Lembaga Kependudukan. Tidak lama berselang, masih di bawah kepemimpinan direktur pertama Prof. Dr. Masri Singarimbun, nama tersebut diganti Pusat Penelitian dan Studi Kependudukan (PPSK) UGM. Seiring dengan perubahan zaman—masa reformasi—dan merespons perkembangan studi kependudukan, pada tahun 2001, kata "Kebijakan" ditambahkan menjadi "Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan" (PSKK) UGM. Dengan demikian PSKK UGM ini merupakan lembaga kependudukan tertua kedua setelah Lembaga Demografi yang dikelola di bawah Fakultas Ekonomi UI (didirikan pada tahun 1964).

Nama PSKK telah diusung lebih dari satu dasawarsa yang kini dikenal hingga di tingkat internasional. Dalam usia yang telah mencapai 39 tahun, PSKK UGM diharapkan terus menorehkan prestasi dan kian mengukuhkan diri sebagai lembaga terkemuka di bidangnya.

Apa sajakah menjadi sebab lembaga ini kuat? Menurut direktur PSKK, Prof. Dr. Darwin, sebagaimana dipresentasikan

pada acara tersebut adalah karena melaksanakan Pancasila (lima prinsip yang saling terkait dan tidak terpisahkan) untuk membangun kepercayaan mitra kerja. Kepercayaan (trust) adalah komoditi dalam kaitannya (linkage) kepada pihak luar dan dalam. Kelima prinsip tersebut adalah (i) jujur; (ii) tanggungjawab; (iii) produktif; (iv) inovatif; dan (v) independen (otonom). Kelima hal ini merupakan ruh atau jiwa dalam menggerakkan organisasi atau lembaga. Organisasi akan kuat apabila memiliki ruh atau jiwa yang kuat.

Pertama, kejujuran dalam mengelola *resource* (keuangan dan orang) dan dilakukan secara transparan. Penguatan kelembagaan hanya dapat dilakukan dengan prinsip dasar kejujuran. Uang adalah modal yang digunakan secara efisien. Uang proyek harus dikelola untuk menguatkan lembaga—jumlahnya kisaran 20% dari keuntungan atau sisa, bukan untuk memperkaya diri sendiri. Kejujuran seperti ini yang menjadi sebab lembaga donor (ekstern) itu percaya kepada lembaga ini. Begitu pula para pengelola dan pegawai—serta keluarganya—menjadi lebih percaya dengan pengelolaan keuangan yang jujur. Tim *accounting* sejumlah empat orang telah melaksanakan tugas secara optimal sehingga siap untuk diaudit kapanpun dan oleh lembaga audit internal maupun eksternal, termasuk pimpinan UGM.

Kedua, tanggung jawab. Melalui sila (prinsip) kedua ini memungkinkan PSKK ini dipercaya (akuntabel) oleh lembaga-lembaga donor—dari dalam dan luar negeri—yang menjadi mitra dalam melakukan berbagai kegiatan penelitian, pelatihan, pendampingan dan lain-lain. Tanggungjawab antara

lain ditunjukkan pada saat penyusunan laporan akhir yang selalu tepat waktu.

Ketiga, produktif. Dilakukan dengan penempatan pengelola dan peneliti yang sesuai dengan bidang keahlian. Sehingga dapat menciptakan tim kerja yang solid dalam setiap kegiatan.

Keempat, inovatif dan difusi. Setiap lembaga yang kuat mengharuskan sikap ini. Menginovasi perkembangan di era reformasi dan otonomi daerah, keberadaan pusat studi ini ditambahkan status "kebijakan" dalam nama lembaganya. Hal tersebut dilakukan sehubungan dengan maraknya kebutuhan data dalam berbagai kegiatan penelitian di berbagai wilayah baik kabupaten/kota dan provinsi.

Kelima, independen (otonom). "Tanpa ada otonomi—terutama dalam pengelolaan keuangan—mustahil Pusat Studi dapat menjadi kuat." Begitu, penegasan yang dikemukaan oleh Kepala/Direktur PSKK UGM kepada peserta workshop di Auditorium Gedung Masri Singarimbun hari selasa 19 Juni itu. PSKK UGM ini dapat kuat karena benar-benar otonom sejak didirikan pada tahun 70-an. Sistem pengelolaan otonom semacam ini memungkinkan para pengelolanya dapat memenej sumberdaya secara maksima dan hasil yang optimal. Hasil dari pengelolaan yang otonomi itu antara lain PSKK UGM mampu membangun Gedung tiga lantai "Masri Singarimbun" senilai Rp 6 milyar dengan biaya sendiri. Unit usaha yang dikembangkan antara lain, Guest House, Rental Mobil, percetakan, fotokopi dan lain-lain. "tidak sepeserpun uang mengucur dari universitas", tandas Prof. Dr. Muhajir Darwin

pada presentasi di Auditorium gedung itu kepada 40-an peserta wworkshop ini. “Pengelolaan kuangan yang mandiri menjadi isu utamanya. Mustahil kelembagaan akan menjadi kuat tanpa pengelolaan modal yang kuat.” Sergahnya lebih lanjut. Dalam amatan penulis, tidak juga sepeserpun rupiah fee yang diberikan kepada Universitas Gadjah Mada. Padahal secara eksplisit menggunakan nama UGM. Meskipun seusai pembangunan gedung itu “diserahkan” ke universitas.

Penerapan di Pusat Studi lainnya?

PSKK UGM merupakan Pusat Studi tertua dan jumlah 30-an yang ditetapkan oleh UGM. Pengelolaan Pusat Studi dengan sistem otonom semacam ini, di internal UGM saja adalah satu-satunya. Apakah pengelolaan otonom semacam ini dapat diterapkan di universitas atau perguruan tinggi lainnya? Pertanyaan ini yang menguat disampaikan oleh para peserta dalam diskusi di ruang Auditorium PSKK UGM tersebut.

Dapatlah disimpulkan bahwa di Indonesia hanya dua PSK (Pusat Studi Kependudukan) yang dapat menerapkan sistem otonom semacam ini. Yakni PSKK UGM dan satunya lagi di UI yang diberi nama Lembaga Demografi. Di UGM saja merupakan satu-satunya pusat studi yang otonom di antara 30-an pusat studi. Di universitas lainnya sebagaimana diterangkan oleh sejumlah peserta dalam diskusi itu, tidak mungkin dapat dilakasanakan.

Umumnya PSK—juga di Universitas Airlangga—dikelola di bawah Lembaga Penelitian yang bertanggungjawab kepada

Rektor. Karenanya intervensi pimpinan universitas sangatlah tinggi. Baik di perguruan tinggi yang berstatus negeri, BHMN (Badan Hukum Milik Negara, BLU (Badan Layanan Umum), ataupun swasta, Melalui menejemen semacam itu, nyaris mustahil dapat mengembangkan PSK yang mandiri, terkecuali di dua perguruan tinggi di Indonesia yakni UI dan UGM. Tentang otonomi PPSK UGM ini, penulis berkesempatan untuk menyampaikan pandangan dengan sedikit berseloroh dalam diskusi itu, "Universitas Gadjah Mada, ibarat kerajaan besar yang otonom. Di dalamnya terdapat kerajaan PSKK yang sangat otonom. Terdapat kerajaan di dalam kerajaan," yang disambut geeeer oleh teman-teman audiens lainnya.

Betul bahwa untuk menjadi PSKK yang kuat haruslah otonom. Tanpa otonomi—total atau seluas-luasnya, terutama dalam pengelolaan sumber daya keuangan—mustahil suatu Pusat Studi di perguruann tinggi akan menjadi kuat. Sayangnya, menerapkan prinsip ini, meminjam kata yang ditayangkan di media televise, "syarat dan ketentuan berlaku." Hanyalah dapat dilakukan oleh orang-orang yang kuat dengan disana-sini harus melakukan "pembangkanan" kepada pimpinan universitas. Sebagaimana kita saksikan di kedua perguruan tinggi itu, yakni UGM dan UI. ***

Foto 5. Kegiatan *Capacity Building* Bidang Kependudukan dan Sosialisasi Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk (17-20 juni 2012).

Sumber: Data Lapangan

Keterangan: Penulis (kanan) bersama KABID Dalduk BKKBN Jawa Timur (Drs. Humphrey Apon, MPA) di Ruang Upper Malioboro, Hotel Saphir Yogyakarta pada acara *Capacity Building* Bidang Kependudukan dan Sosialisasi Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk (17-20 juni 2012).

ARTIKEL-12
Pemberdayaan Lansia Berbasis Komunitas Pedesaan di Jawa Timur

ARTIKEL-12

Pemberdayaan Lansia Berbasis Komunitas Pedesaan di Jawa Timur

Struktur penduduk Jawa Timur telah menua terhitung sejak tiga dekade terakhir. Ukuran struktur tua penduduk *(aging structured population)* telah ditetapkan PBB, apabila persentase penduduk Lansia (Lanjut Usia) berusia 60 tahun ke atas, telah melebihi angka 7%. Di Jawa Timur, jumlah Lansia berdasar SP (Sensus Penduduk) tahun 1990 telah mencapai 10,71%; SP tahun 2000 angkanya turun sedikit, sejumlah 9,36%, dan SP 2010 telah meningkat lagi mencapai angka 11,14%. Melalui angka tersebut struktur menua penduduk Jawa Timur telah melebihi angka empat digit.

Dari jumlah Lansia di Jawa Timur tersebut, mereka tinggal di 661 Kecamatan dan 8.497 Kelurahan/Desa (2.400 kelurahan dan 6.097 desa). Pendataan yang dilakukan oleh Yayasan Gerontologi Abiyoso Jawa Timur pada tahun 2004, mayoritas (54%) dari kelurahan dan desa itu telah mendirikan Karang Werda (KW). KW merupakan wadah bagi kegiatan-kegiatan Lansia. Analog dengan remaja, wadah bagi kegiatan para remaja adalah Karang Taruna (remaja).

Pembentukan KW di Provinsi Jawa Timur telah dilakukan sejak tahun 1990-an dan bahkan sebelumnya. Pembentukan KW semakin marak, antara lain ditetapkannya kebijakan berupa Instruksi Gubernur Jawa Timur tentang Pembinaan terhadap Lanjut Usia pada tahun 1994, yang dilanjutkan dengan Keputusan Gubernur Jatim Nomor 65/1996 tentang Pedoman Pembentukan Karang Werda di Jatim, dan

Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/309/SK/014/1999 tentang Tim Pembina Pemberdayaan Lanjut Usia Provinsi Jatim.

Keberadaan KW itu semakin memperoleh naungan payung hukum yang berkekuatan tetap saat Provinsi Jawa Timur ini menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2007 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Dalam Perda ini dimuat khusus tentang ketentuan kelembagaan dan organisasi pada bab VI pasal 39. Pada pasal 39 ayat 1, 2, 3, dan 4 Perda ini dimuat ketentuan bahwa: (i) Di Desa/Kelurahan dibentuk lembaga Karang Werda yang merupakan wadah bagi kegiatan Lansia; (ii) Karang Werda merupakan lembaga sosial kemasyarakatan mitra Pemerintah Desa atau Kelurahan dalam memberdayakan Lansia; (iii) Pengkoordinasian Karang Werda dilakukan oleh Forum Kerjasama Karang Werda yang merupakan jaringan kerjasama antar Karang Werda pada lingkup kecamatan; (iv) Pembinaan Karang Werda dilakukan oleh Gubernur, Bupati, Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Sedangkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Provinsi Jawa Timur Nomo 5/2007 pada bab V tentang Kelembagaan di bagian Pasal 10 ayat 3 dan 4 disebutkan bahwa (3) Gubernur melakukan pembinaan umum terhadap Karang Werda dan lembaga Lansia lainnya sebagai lembaga kemasyarakatan di tingkat desa dan kelurahan; dan ayat (4) Bupati dan Walikota melakukan pembinaan teknis terhadap Karang Werda melalui Camat dan atau Kepala Desa / Kelurahan.

Dengan demikian, Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 5/2007 tentang Kesejahteraan Lansia dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Provinsi Jawa Timur Nomo 5/2007, merupakan perwujudan kepedulian yang nyata dan konkrit kepada Lansia dari sejumlah kebijakan yang ditetapkan pada tahun dan dekade-delade sebelumnya.

Wadah Pemberdayaan Lansia

Wadah atau lembaga bagi kegiatan Lansia di tingkat paling bawah yakni Desa/Kelurahan di Jawa Timur disebut sebagai Karang Werda (KW). Wadah ini merupakan lembaga sosial kemasyarakatan mitra Pemerintah Desa atau Kelurahan dalam memberdayakan Lansia yang pelaksanaan dalam pengkoordinasiannya dilakukan oleh Forum Kerjasama KW yang merupakan jaringan kerjasama antar KW pada lingkup kecamatan. Dalam hal pembinaan KW, dilakukan oleh Gubernur, Bupati, Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pada empat tahun terakhir yakni, tahun 2009, 2010, 2011, dan 2012, Gubernur Jawa Timur telah melakukan pembinaan KW antara lain dengan menganugrahkan penghargaan kepada KW berprestasi di Kabupaten/Kota. Dalam penganugrahan penghargaan ini dilakukan lomba KW berprestasi tingkat Jawa Timur. Melalui kriteria tertentu, ditetapkan pemenang lomba dengan peringkat prestasi I, II, III, Harapan I, Harapan II, dan Harapan III (Lihat Tabel 9).

Di antara KW di 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang ditetapkan sebagai pemenang Lomba dan memperoleh

penghargaan adalah Kabupaten Nganjuk (3 kali); yaitu KW ”Ngudi Mukti”, KW ”Wijoyo Kusumo”, dan KW ”Kenongo”; Kabupaten Sumenep (2 kali) yang diraih oleh KW ”Ceria” (2009 dan 2012); Kabupaten Sidoarjo (2 kali) yaitu KW ”Arum Dalu” dan KW ”Jenggolo Manik”. Kabupaten lainnya yang memperoleh penghargaan masing-masing sekali adalah Kabupaten Blitar, KW ”Pandu Jati”; Kabupaten Malang, KW ”Permadi”; Kabupaten Mojokerto, KW ”Semar”; Kabupaten Lumajang, KW ”Bakti Pertiwi”, dan Kabupaten Jember, KW ”Flamyonan”.

Adapun KW di Kota-kota di Jawa Timur yang ditetapkan sebagai pemenang lomba dan memperoleh penghargaan adalah Kota Madiun (3 kali) yakni KW ”Kapiworo”, KW ”Bondronoyo”, dan KW ”Bimo Seno”; Kota Malang (2 kali) yaitu KW ”Gatut Kaca”, KW ”Permadi”; Kota Kediri (1 kali) yakni KW ”Karya Mandiri”; Kota Surabaya (1 kali) yaitu KW ”Bimam Shakti”; dan Kota Blitar (1 kali) yakni KW ”Budi Luhur”.

Diantara nama yang disematkan pada KW di Desa/Kota di Jawa Timur umumnya adalah menggunakan nama-nama tokoh pewayangan di Jawa. Tokoh-tokoh tersebut, merupakan orang-orang memiliki kearifan, keadilan, kebijaksanaan yang tinggi di usia Lansianya.

Daya Ungkit Pemberdayaan

Pada saat penulis bersama tim dalam suatu acara penilaian kepada Pembina Lansia, berkesempatan mengunjungi KW ”Ngudi Mukti” di Kelurahan Kartoharjo,

Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk pada pertengahan tahun 2012 yang lalu, KW ini telah berkali-kali memperoleh penghargaan. Sejumlah alat elektorik yang dipajang di ruang pamer KW ini, antara lain berupa peralatan sound system, televisi layar lebar dan lain-lain. Televisi ini masih terbungkus rapi dalam kardus sebagai penghargaan Peringkat Prestasi Lomba Karang Werda se Jawa Timur tahun 2012.

Di Kabupaten Mojokerto, penulis juga pernah mengunjungi KW "Semar" di Desa Sajen, Kecamatan Pacet pada hari Ahad pagi pada akhir tahun 2010. Saat itu penulis menyaksikan para Lansia dii KW "Semar" ini sedang melaksanakan kegiatan Senam Lansia. Penulis juga diperkenalkan kepada sejumlah anggota pengurus di KW itu serta ditunjukkan ruang sekretariat yang berlokasi di sebelah kiri rumah Ketua KW "Semar" ini yang juga tersedi peralatan musik Jawa berupa Gamelan. KW "Semar" merupakan pemenang Peringkat III pada tahun 2010 yang penyerahan hadiahnya dilakukan di Pendopo Kabupaten Jombang.

Penyerahan penghargaan dari kegiatan Lomba KW Teladan/Berprestasi di Jawa Timur semacam ini senyatanya dapat menjadi "daya ungkit" bagi KW itu beserta lingkungan komunitas masyarakat pedesaan/kelurahan agar lebih bersemangat dan peduli dalam melakukan pemberdayaan kepada Lansia agar dapat semakin meningkatkan kualitas kemartabatan dan kemuliaan dalam ikon "Lansia Sejahtera dan dan Berguna.***

Tabel 9. Daftar Karang Werda Beprestasi Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur

a) Tahun 2009

NO. PERINGKAT PRESTASI	NAMA KARANG WERDA/ ALAMAT	
	KARANG WERDA	KAB./ KOTA
I.	Karang Werda "BAKTI PERTIWI " Desa Senduro, Kecamatan Senduro	Kabupaten Lumajang
II.	Karang Werda "KENONGO " Desa Banjarejo, Kecamatan Rejoso	Kabupaten Nganjuk
III.	Karang Werda "CERIA" Desa Batang-Batang Daya, Kecamatan Batang - Batang	Kabupaten Sumenep
Harapan I.	Karang Werda " BIMO SENO " Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Kartoharjo	Kota Madiun
Harapan II	Karang Werda "FLAMBOYAN " Desa Rambipuji, Kecamatan Rambipuji	Kab. Jember

b) Tahun 2010

NO. PERINGKAT PRESTASI	NAMA KARANG WERDA/ ALAMAT	
	KARANG WERDA	KAB/ KOTA
I.	Karang Werda "WIJOYO KUSUMO " Desa Pelem, Kecamatan Kertosono	Kabupaten Nganjuk
II.	Karang Werda "JENGGOLO MANIK" Desa Kalijaten, Kecamatan Taman,	Kabupaten Sidoarjo
III.	Karang Werda " SEMAR " Desa Sajen, Kecamatan Pacet.	Kabupaten Mojokerto
Harapan I.	Karang Werda "BIMA SHAKTI" Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Tegalsari	Kota Surabaya
Harapan II	Karang Werda "BUDI LUHUR" Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kepanjenkidul	Kota Blitar

c) Tahun 2011

NO. PERINGKAT PRESTASI	NAMA KARANG WERDA/ ALAMAT	
	KARANG WERDA	KAB/ KOTA
I.	Karang Werda "Bodronoyo" Kelurahan Ngegong, Kecamatan Manguharjo	Kota Madiun
II.	Karang Werda "Arum Dalu " Desa Gelam, Kecamatan Candi	Kabupaten Sidoarjo
III.	Karang Werda "Karya Mandiri" Kelurahan Semampir, Kecamatan Kediri	Kota Kediri
Harapan I.	Karang Werda " Narotama " Desa Sumberoto, Kecamatan Donomulyo	Kabupaten Malang
Harapan II	Karang Werda "Permadi " Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru	Kota Malang

d) Tahun 2012

NO. PERINGKAT PRESTASI	NAMA KARANG WERDA/ ALAMAT	
	KARANG WERDA	KAB/ KOTA
I.	Karang Werda "NGUDI MUKTI" Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Nganjuk	Kabupaten Nganjuk
II.	Karang Werda "KAPIWORO" Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman	Kota Madiun
III.	Karang Werda "GATUT KACA" Kelurahan Lesanpuro, Kecamatan Kedungkandang	Kota Malang
Harapan I.	Karang Werda "CERIA" Desa Batang-Batang Daya, Kecamatan Batang-Batang	Kabupaten Sumenep
Harapan II	Karang Werda "PANDU JATI" Desa Jati, Kecamatan Udanawu	Kabupaten Blitar

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur 2013, diolah

ARTIKEL-13
Silver College: Wadah Pemberdayaan Lansia di Perguruan Tinggi

ARTIKEL-13
Silver College: Wadah Pemberdayaan Lansia di Perguruan Tinggi

Dengan nada kelakar seorang moderator memulai pembicaraan dengan membedakan konsep "Lanjut Usia" dan "Usia Lanjut." Bila yang pertama disingkat Lansia sedangkan yang terakhir disingkat "Usil" atau bahkan "Sialan." Mengapa sebutan atau predikat yang kedua ini mengemuka? Disebabkan terutama oleh perilakunya yang sesuai namanya mereka suka usil, sok tahu, sok mengatur, bahkan sok kuasa.

Dalam konteks tersebut saya dapat menambahkan, sejumlah perilaku dari tiga orang berikut ini. Waspadalah, perilaku tersebut sesungguhnya merupakan penyakit dan berpeluang pula untuk mengendap dalam diri kita. *Pertama,* "mantan pejabat, akan terkena penyakit *post power syndrome*. Yang sering sekali menyebut pengalaman dirinya saat "berkuasa" pada suatu jabatan tertentu; *Kedua,* mantan dosen atau guru, akan rawan terkena penyakit *post power point* (karena saat mengajar atau ceramah sering menggunakan multimedia *power point*). *Ketiga,* mantan sopir, rawan terkena penyakit "*post power steering*" disebabkan oleh kesukaannya menceritakan kepada setiap orang yang ditemuinya untuk menyebut berbagai kendaraan mewah yang serba elektrik, saat menjadi sopir dari orang atau pejabat penting.

Adapun "sialan" menggambarkan sosok Lansia yang tidak tahu diri. Dalam bahasa Jawa (Suarabaya) masih sering saya dengar "Wong Gerang ora ngerti Gerange" (Orang Tua

yang tidak tahu diri tentang ketuaannya), dengan berperilaku yang tidak patut dilakukan terutama tampak dalam ucapan atau pembicaraan yang keluar dari lisan (mulut)nya.

Ungkapan moderator itu disampaikan dalam seminar yang dilaksanakan sesaat setelah peluncuran (*launching*) "Silver College" di Fakultas Kesehaan Masyarakat Universitas Airlangga Kampus C sekaligus merayakan Dies universitas ini yang ke-56. Saya yang ditugasi sebagai narasumber dalam acara itu menyampaikan materi tentang "Model Pemberdayaan Lansia di Jawa Timur tahun 2007-2012".

Sepuluh Anasir

Pemberdayaan sebagai terjemahan dari *empowering* dalam term bahasa Indonesia juga tepat bila disebut sebagai penguatan saat diambil dari kata dasar *power* atau kuat. Anasir (dimensi, atau unsur) pemberdayaan memiliki minimal Sembilan. Kesembilan anasir tersebut adalah (i) *participating*; (ii) *mobilizing*; (iii) *enabling*; (iv) *characterizing*; (v) *emancipating*; (vi) *protecting*; (vii) *inniciating*; (viii) *engginering*; dan (ix) *networking*.

Pertama, *participating*. Ini merupakan inti awal pengertian pemberdayaan. Yakni partisipasi dari subyek yang diberdayakan. Melalui pendekatan yang tepat memungkinkan seseorang atau sekelompok orang dalam lembaga maupun perorangan dapat berpartisipasi, berperan serta, dan atau terlibat dalam suatu kegiatan. Misalny, berpartisipasi dalam kegiatan Posyandu Lansia sebagai peserta atau sebagai sponsor atau nara sumber.

Kedua, mobilizing. Dekat dengan pengertian partisipasi, maka mobilisasi merupakan anasir lain dari pemberdayaan. Saat termobilisasi (tergerakkan, terpindahkan)nya orang atau sekelompok orang dalam suatu kegiatan, maka sesungguhnya telah terliput dalam pengertian berdaya. Minimal terdapat kekuatan untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya.

Ketiga, enabling. Sebagai anasir dari pemberdayaan, *enabling* merupakan aktivitas untuk penciptaan lingkungan, situasi dan atau kondisi sedemikian rupa yang dengan aktivitas itu dapat berpeluang untuk melakukan penguatan kepada orang dan atau sekelompok orang. Bentuk enabling umumnya dalam bentuk tulisan dan yang tertinggi berupa peraturan perundangan dan peraturan pelaksanaannya. Peraturan pelaksaanaan dapat berupa Surat Instruksi, Surat Edaran, dan surat teknis lainnya seperti Surat Tugas.

Keempat, *characterizing*. Merupakan bagian anasir pemberdayaan. *Characterizing* lebih bermakna pengkarakteran (pewatakan, pempribadian, dan penjatidirian) kepada seseorang dan atau sekelompok orang misalnya karakter mulia, dan martabat. Melalui pengkarakteran ini menjadi penyebab seseorang lebih mulia dan bermartabat dalam kehidupannya. Berarti pula melalui pengkarakteran ini dapat melaksanakan misi lebih baik kehidupan kesehariannya dibandingkan hari kemarinnya.

Kelima, emancipating. Sebagai bagian anasir dari pemberdayaan, maka emansipasi ini bermakna pembebasan dari berbagai belenggu yang menyelimuti orang dan atau sekompok orang (Lansia). Sejumlah kegiatan yang dilakukan

oleh suatu organisasi yang berkemampuan untuk melakukan pembebasan, misalnya dari kejenuhan kegiatan keseharian, maka ia terliput dalam pengertian emansipasi.

Keenam, protecting. Protecting diartikan sebagai perlindungan. Perlindungan dapat dilakukan kepada seseorang dan atau sekelompok orang (Lansia) agar mereka dapat terus meningkatkan keberdayaannya. Misalnya Lansia yang potensial dan memiliki keterampilan tertentu di bidang kesenian maka perlindungan hendaknya dilakukan agar keterampilan tersebut terus dapat digunakan, yang dengannya Lansia merasa masih berharga.

Ketujuh, inniciating. *Inniciating* sebagai bagian dari pemberdayaan lebih bermakna sebagai pemdampingan yang dilakukan oleh orang dan atau sekelompok orang yang telah berdaya. Melalui pendampingan ini berpeluang untuk semakin berdaya dari orang dan atau komunitas yang sebelumnya kurang bahkan tidak berdaya. Pendampingan kepada sekelompok orang atau komunitas dapat melahirkan organisasi yang dengannya berpeluang untuk semakin memberdayakan Lansia.

Kedelapan, engginering. Sebagai pengertian dari perekayasaan, dalam pengertian positif, mendasarkan pada hasil penelitian yang akurat, perekayaan juga diartikan sebagai pengarahan (*directing*) untuk mencapai tujuan yang lebih positif. Dilakukan perekayasaan sedemikian rupa misalnya pembentukan organisasi peduli Lansia seperti "Silver College" di Universitas Airlangga ini sehingga berpeluang bagi orang-orang yang peduli kepada Lansia dapat bergabung

(kolaborasi) untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan secara bersama.

Kesembilan networking. *Networking* sebagai terjemahan dari penjejaringan (*network*=jaringan) merupakan bagian dari pemberdayaan. Yaitu seperangkat aktivitas yang dimaksudkan untuk melakukan penguatan dengan menjalin jejaring dari sejumlah individu baik sebagai representasi dari pribadi atau kelompok (oraganisasi) yang bersepakat untuk melakukan kegiatan tertentu. Penjejaringan dilakukan sampai pada lintas batas kawasan, RT (Rukun Tetangga), RW (Rukun Warga), Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Nasional, regional, dan multi-nasional, serta multi-regional.

Kesepuluh, refreshing. Sebagai bagian dari anasir pemberdayaan, refreshing diartikan sebagai penyegaran. Berbagai kegiatan yang dilakukan kepada perorangan dan atau organisasi yang dimaksudkan untuk melakukan penyegaran adalah bagian dari pemberdayaan. Terliput dalam pengertian penyegaran adalah *reinstalling* (peng-instal-an ulang), *upgrading,* dan *ispiring*. Melalui kegiatan penyegaran ini, berpeluang untuk mengatasi berbagai kejenuhan yang terjadi.

Kesepuluh anasir pemberdayaan ini merupakan elemen yang terkait yang satu dengan lainnya bersifat saling menguatkan atau memberdayakan.

Silver College

Pemberdayaan Lansia di Jawa Timur semakin memperoleh dukungan dari berbagai kalangan masyarakat. *Silver College* (SC), di lahirkan di lingkungan Perguruan Tinggi. Bertepatan dengan Dies Natalis ke-58 organisasi ini diluncurkan di Fakultas Kesehaan Universitas Airlangga Kampus C Jl. Mulyorejo Surabaya. SC dimaksudkan sebagai wadah bagi para warga Civitas Akademika di perguruan tinggi ini untuk lebih memberdayakan Lansia. Secara lebih spesifik, SC merupakan wadah pegiat bagi para Lansia dalam berkiprah terus mengembangkan diri untuk memanfaatkan diri untuk kemanfaatan diri sendiri dan masyarakat.

Tujuan SC adalah memfasilitasi kesiapan bagi para Lansia (potensial) untuk membangun kembali kiprah dan cinta diri dalam memberikan pilihan baru, berperan serta dalam kesempatan lanjutan dalam membangun Negara, bangsa, masyarakat, dan keluarga. Empat tujuan khusus SC adalah (i) menyelenggarakan identifikasi dan assessment individu tentang minat (kehendak) Lansia untuk tetap berperan dalam membangun keluarga, masyarakat, bangsa, dan Negara; (ii) merancang (rekayasa) kerangka pendidikan dan pelatihan berkelanjutan untuk membangun kapasitas/kemampuan/keberayaan diri para Lansia dengan konsep "life-long learning education" (pembelajaran seumur hidup); (iii) merancang dan melaksanakan kegiatan percontohan *(pilot institutions)* untuk memberikan kesempatan lanjut untuk menyempurnakan kemampuan diri Lansia; (iv) memberikan motivasi, bimbingan, dan fasilitasi bagi Lansia

lainnya, dalam membaktikan terus dirinya dalam membina keluarga dan masyarkat.

Kita support dan doakan semoga *Silver College* merupakan bagian dari titik embun—organisasi—yang berkolaborasi dengan embun lainnya di nusantara ini yang pada saatnya dapat menjadi hujan di musim kemarau sekalipun. Kehadirannya sungguh diharapkan dan dirindukan di saat yang tepat yakni dibutuhkan oleh keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. ***

DAFTAR PUSTAKA

Adib, Mohammad. 2008. *Penelitian Lansia Di Perkotaan: Tinggal Bersama Keluarga Lebih Nyaman*. Dalamhttp://madib.blog.unair.ac.id/files/2008/11/penelitian-lansia-di-perkotaan.pdf. Diakses pada tanggal 7 Januari 2013.

Adib, Mohammad. 2009. *Syahwat (Meningkatkan Kesejahteraan) Lansia*. Surabaya: Pustaka Pelajar.

Afiah, Fiandari Nor. 2007. *Hubungan Antara Keharmonisan Keluarga dengan Sikap Terhadap Seks Pranikah pada Remaja. http://fpsi.mercubuana-yogya.ac.id* (10 Desember 2012).

Badan Pusat Statistik Indonesia. 2012. *Jumlah Penduduk Indonesia*. Dalam http://Badan Pusat Statistika.co.id. Diakses tanggal 12 November 2013.

BKKBN. 1999. *Pendewasaan Usia Perkawinan*. Jakarta: Biro Pembinaan Pendidikan Keluarga Berencana.

BPPKB Kabupaten Jember. 2014. *Laporan Pernikahan Berdasarkan Umur Istri Di Kabupaten Jember*. Jember: BPPKB Kabupaten Jember.

Erfandy. 2008. *Pengelolaan Posyandu Lansia*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Fadila Oktavia Sari Banun, Soedijono Setyorogo. 2013. *Faktor-Faktor yang Berhubungan Dengan Perilaku Seksual Pranikah Pada Mahasiswa Semester V di STIKes X Jakarta Timur 2012*. Jurnal Ilmiah Kesehatan. Vol.5. No.1. Jan 2013.

Fatmawati. 2012. *Pernikahan Dini Pada Komunitas Muslim Madura Di Kabupaten Jember*. Jurnal Edu-Islamika. Vol.3 No.1 Maret 2012.

Faturochman. 2001. *Reorientasi Kebijakan Kependudukan*. Adytya Media, Yogyakarta.

Hairi. 2009. *Fenomena Pernikahan di Usia Muda di Kalangan Masyarakat Muslim Madura: Studi Kasus di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan*. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Hanggara, A.D., Ali A.M., Hendri D, &Fahrur R. 2010. *Studi Kasus Pengaruh Budaya Terhadap Maraknya Pernikahan Dini di Desa Gejugjati Pasuruan*. Jakarta:Dikti.

Hans, Antlöv, Derick W. Brinkerhoff, dan Elke Rapp. 2008. *Civil Society Organizations and Democratic Reform: Progress, Capacities, and Challenges in Indonesia*. RTI International. Paper presented at: 37th Annual Conference Association for Research on Nonprofit Organizations and Voluntary Action Philadelphia PA. November 20-22, 2008

Hasmi A. dkk. 2003. *Membantu Remaja Memahami Dirinya*. Jakarta: BKKBN.

Kemenkes RI. 2012. *Menuju Tua Sehat, Mandiri Dan Produktif*. Jakarta: Kemenkes RI.

Kementrian Agama RI.2013. "Tingkat Perceraian di Jawa Timur Menembus Angka 81.672 Kasus." Dalam ttp://jatim.kemenag.go.id/file/file/mimbar318/yexd1362718607.pdf. Diakses pada 24 April 2015.

Maryam, dkk. 2011. *Mengenai Usia Lanjut dan Perawatannya*. Jakarta: Salemba Medika.

Nurjati, L & Wardyaningrum, D. 2012. *Komunikasi Keluarga dalam Pengambilan Keputusan Perkawinan di Usia Remaja*. Jurnal Al-Azar Indonesia Seri Pranata.Vol. I. No.4. Hal. 236-248. September 2012.

Noor, Munawar. 2015. *Kebijakan Pembangunan Kependudukan dan Bonus Demografi*. Serat Acitya – Jurnal Ilmiah Untag Semarang. Vol 4, No 1. Hal 121-128.

Pratiwi, Niniek L, Dan Hari Basuki. 2010. *Analisis Hubungan Perilaku Seks Pertamakali Tidak Aman Pada Remaja Usia 15–24 Tahun Dan Kesehatan Reproduksi*. Buletin Penelitian Sistem Kesehatan. Vol 13, No 4. Oktober 2010. Hal. 309-320.

Santrock, J. 2007. *Remaja*. Edisi 11 Jilid 2. Erlangga. Jakarta.

Sarwono, Sarlito. 2012. *Psikologi Remaja*. Jakarta: Rajawali Press.

Sudikno, Bona Simanungkalit, dan Siswanto. 2011. *Pengetahuan Hiv dan AIDs Pada Remaja di Indonesia: Analisis Data Riskesdas 2010*. Jurnal Kesehatan Reproduksi Vol. 1 No 3, Agustus 2011. Hal. 145 -154.

WHO. 2013. *Child Marriages: 39.000 Every Day*. Dalam http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2013/child_marriage_20130307/en/. Diakses tanggal [29 Maret 2015.

Widyastuti, Elisabet Setia Asih. 2009. "Personal dan Sosial Yang Mempengaruhi Sikap Remaja Terhadap Hubungan Seks Pranikah." *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*. Vol.4/No2/Agustus 2009. Jawa Tengah: PKBI.

PROFIL PENULIS

Drs. H. Moh. Adib, MA. Lahir di Jombang, pada 28 November 1960, adalah Lulusan Filsafat Barat Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pendidikan S-2 dan gelar MA nya diperoleh di Universitas Indonesia Departemen Antropologi Kampus Salemba Jakarta. Ia adalah dosen pada Departemen Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga sejak tahun 1987. Jabatan fungsionalnya adalah Lektor Kepala; Ketua Pusat Studi Kependudukan LPPM UNAIR (2008-2010); Pengurus LLI (Lembaga Lansia Indonesia) Provinsi Jawa Timur (2003-2006); Pengurus Komda (Komisi Daerah) Lansia Provinsi Jawa Timur (2007-2010 dan 2011-2014); Pengurus Koalisi Kependudukan Provinsi Jawa Timur (2011-2014 dan 2015-2019).

Tulisan-tulisannya antara lain: *Filsafat Ilmu: Ontologi, Epistemologi, Aksiologi dan Logika Ilmu Pengetahuan* (Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2009); *Excellence With Morality: Mutiara Jatidiri Universitas Airlangga dan Universitas Kebangsaan* (Editor, Departemen Antropologi Fisip UNAIR dan Bayu Media, Malang: 2010), *Pendidikan Karakter untuk Penguatan Wawasan Bangsa dan Jatidiri Mahasiswa Airlangga* (Editor Bersama Listiyono Santoso, Airlangga Univerity Press, Surabaya: 2011), *Dialog Peradaban Lintas Agama dan Budaya* (Editor, Zifatama Publisher, Surabaya: 2013) *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan: Sebuah*

Pengantar Membangun Karakter Bangsa (Airlangga Univerity Press, Surabaya: 2013). Tulisan lainnya adalah *Syahwat (Meningkatkan Kesejahteraan) Lansia* (Pustaka Intelektual, Surabaya: 2009) dan *Bangunlah Jiwanya Bangunlah Bangsanya: Penguatan Karakter Bangsa dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan*. (Kerjasama Direktorat Pendidikan Universitas Airlangga dan SAGA, Surabaya: 2015).

Penulis telah berkeluarga sejak 29 tahun yang lalu dengan seorang istri bernama drg. Hj. Umi Muzayanah, memperoleh karunia tiga orang putri, dua orang menantu, dan dua orang cucu. Anak pertama drg. Azna El Hayat dinikahi oleh Muhammad Jamaluddin Ayub, ST. Anak kedua Nadia Tsaurah SIIP dinikahi oleh Prasasti Prasasti Irinto, dan anak ketiga diberi nama Afhama El Madanny. Dari anak pertama dikaruniai seorang cucu Aflah Mohammad Ali, dan dari anak kedua dikaruniai seorang cucu Aryasatya Al- Rasyid Irianto. Kini penulis beralamat tempat tinggal di Tira Medayu Regency Blok B-1 Kelurahan Med. Ayu, Kecamatan Rungkut Surabaya 60295. Email: moh.adib@fisip.unair.ac.id; Tulisan dan diskusi dapat diakses di situs: http://madib.blog.unair.ac.id. Handphone (WA) yang dapat dihubungi +6281-551-62342; Tweeter @mohadib1; dan FB : Mohammad Adib. Situs tersebut memperoleh penghargaan terbaik peringkat pertama selama tiga kali pada empat tahun terakhir sejak tahun 2011.

View publication stats

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA – INDONESIA

Indonesia hanya membutuhkan waktu 40 tahun saja untuk [illegible] jumlah penduduk setengah milyar jiwa, dari 255 juta jiwa pada 2015. Angka setengah milyar itu merupakan [illegible] dua kali lipat (200%)nya, dengan tingkat LPP (Laju Pertumbuhan Penduduk) 1,49% pertahun. Dalam kurun [illegible] tahun terakhir saja, penduduk Indonesia telah [illegible] juta jiwa. Merupakan angka yang setara dengan jumlah penduduk di Provinsi Jawa Timur berdasarkan SP (Sensus Penduduk) tahun 2010 yang berjumlah penduduk 238 juta jiwa. Pemerintah melalui BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) bertekad untuk menurunkan LPP nasional dari 1,49% pertahun menjadi 1,38% pertahun melalui Renstranya. Jika gagal dalam melaksanakan tekat tersebut, maka bukan mustahil penduduk Indonesia akan mencapai jumlah setengah milyar. Atas dasar gambaran tersebut, buku kalangan saudara Drs. H. Muhammad Adib, MA., ini bisa menjadi referensi penting untuk mendalami dinamika penduduk secara filosofis, dan upaya yang perlu dilakukan oleh para pihak yang peduli terhadap masalah kependudukan (Sunarto, MPA, Ph.D. Direktur Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk BKKBN).

Drs. H. Moh. Adib, MA. Lahir di Jombang, pada 28 November 1960 adalah Lulusan [illegible] Fakultas [illegible] Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pendidikan S-2 dan gelar MA nya diperoleh di Universitas Indonesia Departemen Antropologi Kampus Salemba Jakarta. Ia adalah dosen pada Departemen Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga sejak tahun 1987. Jabatan fungsionalnya adalah Lektor Kepala. Ketua Pusat Studi Kependudukan LPPM UNAIR (2008-2010), Pengurus [illegible] Provinsi Jawa Timur (2001-2006), Pengurus [illegible] Daerah [illegible] Jawa Timur ([illegible]) dan 2011-2016), Pengurus Koalisi Kependudukan (KK) Provinsi Jawa Timur 2011-2014 dan 2015-2019).

Diterbitkan atas kerjasama:

Penerbit [illegible] Press
Jl. [illegible]
Surabaya [illegible]
email: [illegible]
www.[illegible]
Hp. [illegible]

Pusat Studi
Kependudukan dan Kebijakan
(PSKK)
Universitas Airlangga

ISBN 978-602-[illegible]